Pendidikan Untuk Semua

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

LAPORAN EVALUASI CAPAIAN PUS PROVINSI JAMBI

TAHUN 2017

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PUS
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO. 06 TELANAIPURA JAMBI TELP./ FAKS (0741) 63197 KODE POS 36122
PORTAL : HTTPS://DISDIK.JAMBIPROV.GO.ID/ | E-MAIL : PENDIDIKAN@JAMBIPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rachmat-Nya sehingga laporan evaluasi capaian Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Jambi dapat diselesaikan.

Laporan evaluasi ini berisi laporankan hasil pelaksanaan 6 (enam) program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Keaksaraan; (4) Pendidikan Kecakapan Hidup; (5) Pendidikan Pengarusutamaan Gender; dan (6) Peningkatan Mutu Pendidikan.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan guna pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Provinsi Jambi. Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam negara kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Laporan ini merupakan evaluasi capaian PUS selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011 – 2015.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Jambi, November 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi,

H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. DASAR HUKUM 2

C. TUJUAN 2

D. RUANG LINGKUP 3

E. SASARAN 3

F. PEMBANGUNAN MENYELURUH DAN TREN WILAYAH 4

G. ARAH KEBIJAKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN 7

BAB II. PERKEMBANGAN CAPAIAN PROGRAM PUS PROVINSI **8**

A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 8

1. Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12

2. Mutu Guru Pendidikan Anak Usia Dini 16

B. PENDIDIKAN DASAR 20

1. Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Dasar 20

2. Mutu Guru Pendidikan Dasar 26

C. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH) 28

D. PENDIDIKAN KEAKSARAAN 44

E. PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN (PUG) 49

F. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 60

BAB III. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PUS **67**

A. Penilaian terhadap Strategi Pelaksanaan PUS 67

B. Faktor Pendukung dan Penghambat 70

C. Kisah Sukses (*Best Practice*) Pelaksanaan Program PUS 72

BAB IV. TANTANGAN WILAYAH DAN PRIORITAS PENDIDIKAN PASCA 2014 74

BAB V. KESIMPULAN DAN PEMBAN GUNAN BERKELANJUTAN 76

A. Kesimpulan 76

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 77

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Luas Wilayah Provinsi Jambi i
2. Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2016 Menurut Kab./Kota ii
3. Perkembangan APK PAUD Umur 3-6 Tahun Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015 iii
4. Perkembangan jumlah lembaga PAUD berdasarkan Satuan PAUD Tahun 2011 – 2015 iv
5. Perkembangan Jumlah Guru PAUD Berdasarkan Kualifikasi Tahun 2015 v
6. Perkembangan APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015 vi
7. Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015 vii
8. Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015. viii
9. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015 ix
10. Jumlah Siswa Paket A dan Paket B per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015 x
11. Perkembangan Jumlah Guru SD dan Sederajat Berdasarkan Kualifikasi per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015 xi
12. Persentase Siswa SMP Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 – 2015 xii
13. Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Jenis Kelamin Per kabupaten/kota Tahun 2015 xiii
14. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015 xiv
15. Perkembangan Jumlah Anak Umur 3-6 Tahun Terlayani PAUD Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015 xv
16. Jumlah Pengangguran Terbuka per kabupaten/kota Tahun 2015 xvi
17. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Tahun 2011 – 2015 xvii
18. Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 xviii

19. Jumlah Lembaga PKBM Kabupaten/Kota se-Provinsi JambiTahun 2011 – 2015 xix
20. Jumlah dan Persentase Pengangguran Yang Terlayani PKH Tahun 2015 xx
21. Jumlah Penduduk Tuna Aksara Umur 15-59 Tahun
Menurut Jenis Kelamin per kabupaten/kota Tahun 2015 xxi
22. Disparitas Angka Melek Huruf Laki-Laki Terhadap Perempuan
Tahun 2013 – 2015 xxii
23. Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015 xxiii
24. Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015 xxiv
25. Perkembangan APM SD/MI/Paket A Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015 xxv
26. Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Menurut PG dan IPG
Tahun 2013 – 2015 xxvi
27. Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B Tahun 2013 – 2015 xxvii
28. Perkembangan APK SMP/MTS/Paket B Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015 xxviii
29. Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B Menurut PG dan IPG
Tahun 2013 – 2015 xxix
30. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 xxx
31. Perkembangan Rasio Siswa Guru Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 xxxi
32. Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar Tahun 2013 – 2015 xxxii
33. Perkembangan Persentase Guru SD, SMP dan SM Menurut Ijazah Tertinggi
Tahun 2013 – 2015 xxxiii
34. Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP per kabupaten/kota
Tahun 2013 – 2015 xxxiv
35. Perkembangan Persentase Lulusan SD, SMP dan SM
Tahun 2013 – 2015 xxxv
36. Perkembangan Jumlah SD, SMP, dan SM yang Terakreditasi
Tahun 2013 – 2015 xxxvi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deklarasi Dakar tahun 2000 telah menjadi bagian kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun rencana jangka panjang pelaksanaan program Program Pendidikan Untuk Semua/*Education for All* (PUS/EFA) tahun 2000-2015 yang memuat penyelenggaraan 6 (enam) program yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Kesepakatan Deklarasi Dakar tahun 2000 memuat tentang: (1) memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung; (2) menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik; (3) menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai; (4) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; (5) menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik; (6) memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

Kebijakan yang berpihak pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan, merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Kualitas sumberdaya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diamanatkan melalui Pembukaan UUD 1945.

Diharapkan dengan disusunnya laporan tahunan tepat waktu secara rutin permasalahan, hambatan dapat diketahui lebih awal, prestasi dapat dicapai dan kebijakan tahun berikutnya dapat direncanakan lebih baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2;
2. *World Fit for Children* 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Aniaya, Eksploitasi dan Kekerasan;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 dan ayat 5, serta pasal 26;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua;
5. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Jambi.
6. DPA Nomor : 1.01 01 22 30 5 2, tanggal 3 Januari 2017 Kegiatan Pendidikan Untuk Semua

C. Tujuan

Laporan pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Jambi tahun 2017 disusun dengan tujuan:

1. Menyampaikan informasi tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan

Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan selama 5 (lima) tahun;

2. Memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan selama 5 (lima) tahun;
3. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan selama 5 (lima) tahun.
4. Menyampaikan informasi tentang tantangan wilayah dan program prioritas Pendidikan untuk Semua (PUS) selama 5 (lima) tahun.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan PUS Provinsi Jambi tahun 2017 meliputi:

1. Rumusan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
2. Evaluasi laporan capaian kinerja pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Analisis situasi dan kondisi pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan analisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan.

E. Sasaran

1. Dokumen Laporan Tahunan PUS disusun sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan PUS dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program PUS selama 5 (lima) tahun;
2. Bahan acuan untuk menyempurnakan Rencana Aksi Daerah (RAD) bagi pengurus Forum PUS dan anggota Kelompok Kerja Forum PUS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

F. Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.43 Km^2 dengan luas daratan 50.160,05 Km^2 dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km^2 terdiri dari :

- Kabupaten Kerinci : 3.355,27 Km^2 (6,69%)
- Kabupaten Merangin : 7.679 Km^2 (15,31%)
- Kabupaten Sarolangun : 6.184 Km^2 (12,33%)
- Kabupaten Batanghari : 5.804 Km^2 (11,57%)
- Kabupaten Muaro Jambi : 5.326 Km^2 (10,62%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 5.445 Km^2 (10,86%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 4.649,85 Km^2 (9,27%)
- Kabupaten Tebo : 6.461 Km^2 (12,88%)
- Kabupaten Bungo : 4.659 Km^2 (9,29%)
- Kota Jambi : 205.43 Km^2 (0,41%)
- Kota Sungai Penuh : 391.5 Km^2 (0,78%)

Luas wailayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km^2 atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km^2 dan 6.184 Km^2.

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 141 kecamatan dan 1.562 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Kabupaten Kerinci yaitu 285 desa/kelurahan.

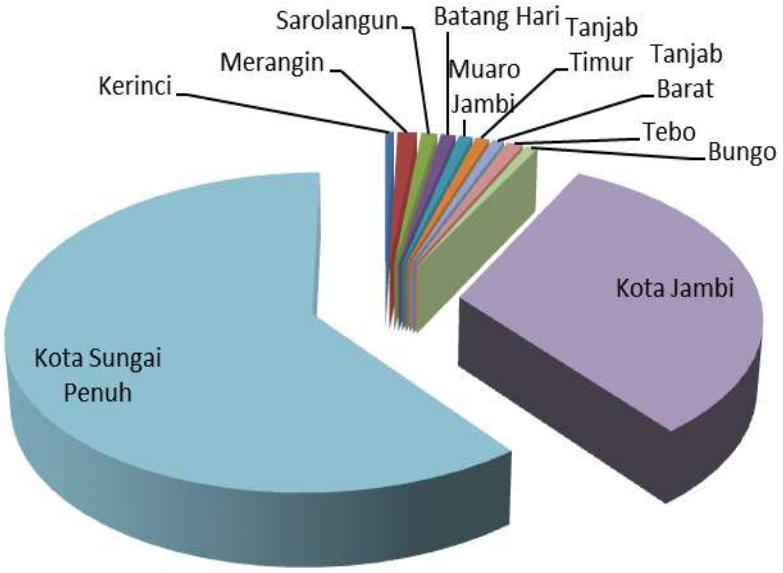

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jambi

Gambar 1.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi (Km^2), 2016

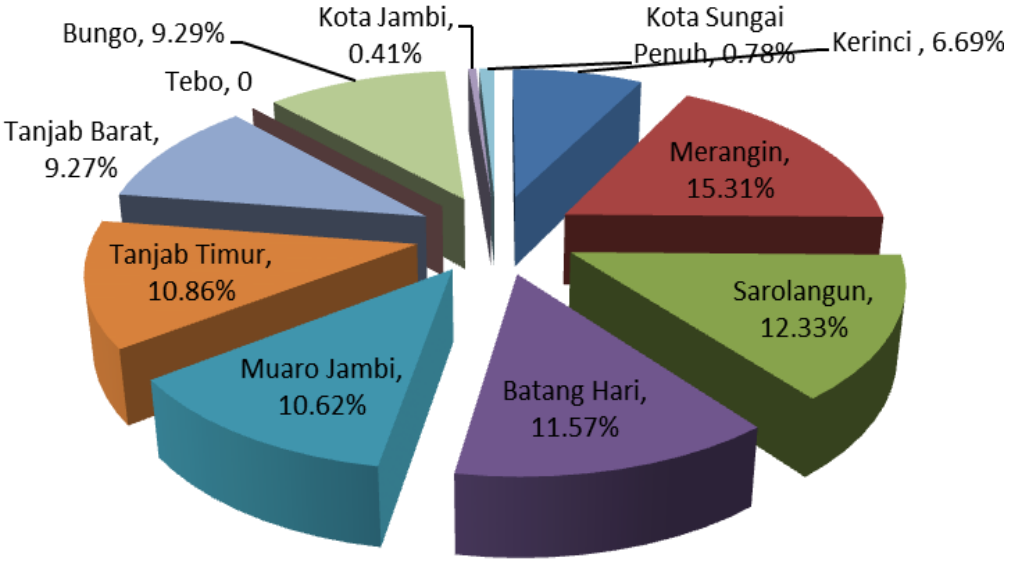

Gambar 1.2 Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi (%), 2016

Provinsi Jambi merupakan rumah bagi 3,458,926 jiwa penduduk atau sebanyak 1,4% dari total penduduk Indonesia tahun 2016. Dengan jumlah penduduk usia

sekolah mencapai 0,75 juta jiwa atau 22,52% dari total populasi. Kepadatan Penduduk tahun 2016 menurut Kabupaten/Kota :

- Kabupaten Kerinci : 70 Orang / Km^2
- Kabupaten Merangin : 48 Orang / Km^2
- Kabupaten Sarolangun : 45 Orang / Km^2
- Kabupaten Batanghari : 45 Orang / Km^2
- Kabupaten Muaro Jambi : 77 Orang / Km^2
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 39 Orang / Km^2
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 68 Orang / Km^2
- Kabupaten Tebo : 52 Orang / Km^2
- Kabupaten Bungo : 75 Orang / Km^2
- Kota Jambi : 2.840 Orang / Km^2
- Kota Sungai Penuh : 244 Orang / Km^2

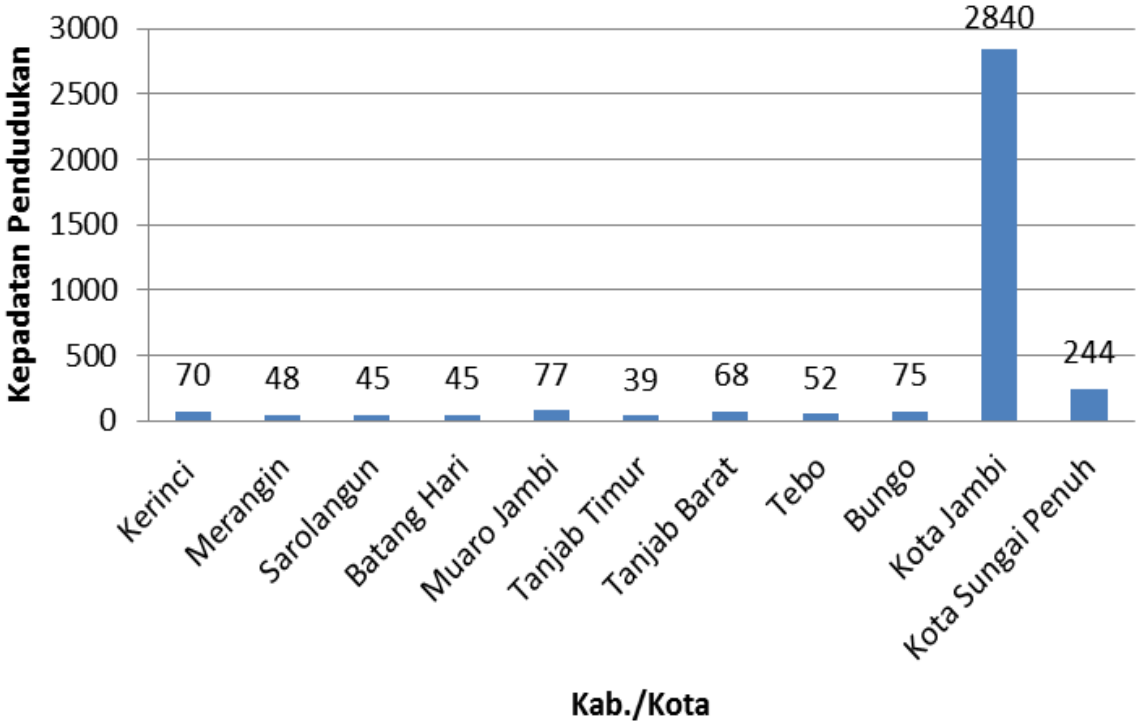

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Gambar 1.3 Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2016 Menurut Kab./Kota

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Provinsi Jambi sudah cukup baik, tetapi muncul beberapa tantangan terkait dengan perubahan demografi,

perubahan ekonomi dan pasar tenaga kerja, kemajuan teknologi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

G. Arah Kebijakan Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan

Arah kebijakan terhadap pembangunan bidang pendidikan Provinsi Jambi antara lain:

1. Memperluas akses pendidikan;
2. Memperkuat kebijakan yang mendukung program PAUD, antara lain memperbaiki nutrisi anak, meningkatkan akses dan partisipasi PAUD, dan lainnya;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terfokus pada meningkatkan hasil pembelajaran siswa;
4. Memperbaiki manajemen sekolah, tata kelola, serta sistem pendidikan dan sekolah;
5. Meningkatkan partisipasi anak perempuan terhadap pendidikan;

BAB II
PERKEMBANGAN CAPAIAN PROGRAM PUS PROVINSI

Bab ini menguraikan secara detail tentang evaluasi capaian 6 (enam) program PUS di Provinsi Jambi meliputi; (i) Pendidikan Anak Usia Dini, (ii) Pendidikan Dasar, (iii) Pendidikan Kecakapan Hidup, (iv) Pendidikan Keaksaraan, (v) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan (PUG), dan (vi) Peningkatan Mutu pendidikan. Bab ini juga membandingkan pencapaian program PUS antara nasional, provinsi dan beberapa kabupaten kota.

A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi emas pada 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 2045. Fokus PAUD adalah untuk mengembangkan keterampilan fisik (motorik), kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual), sosio-emosional (sikap, perilaku, dan agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap keluarga memiliki akses ke Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas.

Saat ini Layanan PAUD dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) Taman Kanak-Kanak (TK), (2) Kelompok Bermain (KB), (3) Taman Penitipan Anak (TPA), (4) Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terintegrasi dengan Posyandu, dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, (5) Raudhatul Athfal (RA), (6) Bustanul Atfal (BA), (7) Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) berada dibawah naungan Kementerian Agama dan dikoordinasikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi serta (8) Bina Keluarga Balita (BKB) berada dibawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

a. Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah bentuk layanan PAUD. Tujuan penyelenggaraan TK adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta

anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran TK adalah anak usia 4 – 6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.

b. Raudhotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)

RA/BA merupakan salah satu bentuk PAUD setingkat TK. Perbedaan RA/BA dengan TK adalah pada nuansa keagamaannya, di mana pembalajaran nilai-nilai agama Islam pada RA/BA lebih menonjol dan menjiwai keseluruhan proses belajar mengajar.

Tujuan penyelenggaraan RA/BA adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain.

c. Kelompok Bermain (KB)

Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berfungsi membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dansiap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Sasaran KB adalah anak usia 2 – 6 tahun.

Program KB memiliki layanan bimbingan kepada anak dan orangtua. Layanan kepada anak berupa bimbingan untuk mengenal dirinya, bakat dan minatnya serta mengenal lingkungan di sekitarnya. Layanan bimbingan kepada orangtua ditujukan untuk memberikan informasi kepada orangtua tentang program pembelajaran di KB, pembinaan tentang pola pengasuhan dan perawatan (misalnya tumbuh kembang, gizi, dsb), serta memberikan informasi kepada orangtua tentang perkembangan anak mereka dan cara memberikan pengasuhan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan permasalahan setiap anak.

d. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk layanan yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Sasaran layanan TPA adalah anak usia 0 – 6 tahun. Jangka waktu anak tinggal di TPA berkisar antara 8 – 10 jam per hari selama 5 – 6 hari per minggu.

e. Satuan PAUD Sejenis (Pos PAUD dan Bina Keluarga Balita)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB). Pos PAUD diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pada prinsipnya, Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-royong, kerelaan, dan kebersamaan.

Pos PAUD mengintegrasikan pemberian layanan pendidikan dengan layanan kesehatan serta gizi bagi anak yaitu kegiatan di Posyandu dengan layanan pendidikan. Posyandu adalah wahana kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu yang mencakup aspek perawatan kesehatan dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-5 tahun. Kegiatan Posyandu merupakan kegiatan ”dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat” di bawah bimbingan petugas kesehatan.

Program Posyandu memberikan intervensi dasar yang bersifat pencegahan (preventif), berupa pelayanan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak balita. Program yang terpenting adalah: (1) program perluasan imunisasi (PPI) atau *Expanded Immunization Program,* yang memberi imunisasi tetanus, typhus, diphteria, polio dan campak (*measles*); (2) program pengendalian untuk meredakan diare yang memberikan dan meningkatkan terapi dalam bentuk rehidrasi oral; dan (3) program intervensi yang berupa pengawasan/perawatan terhadap pertumbuhan anak, serta

pendidikan gizi dengan memberikan vitamin A dan mineral besi, serta yodium kepada anak-anak dan para ibu. Semua program tersebut merupakan bagian dari kegiatan bulanan masyarakat, dimana para ibu membawa anak-anak mereka untuk menerima berbagai pelayanan itu dari tenaga kesehatan yang dibantu para kader/tenaga sukarela yang telah terlatih. Tempat pertemuan bulanan ini dapat menggunakan rumah kepala desa, balai desa, balai pertemuan dan lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan.

Leading sektor pembinaan Posyandu adalah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan penanggung jawab teknisnya adalah Kementerian Kesehatan. Pembina operasional adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dari tingkat Pusat hingga ke tingkat rukun tetangga (RT). Sementara Pembinaan Pos PAUD di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan (TPD/K) yang beranggotakan unsur-unsur perangkat desa/kelurahan, dewan perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan PKK/ormas penggerak.

Salah satu layanan di Posyandu adalah Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya. BKB juga merupakan wahana bagi orang tua dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

Sasaran utama program BKB adalah keluarga yang mempunyai anak balita dan usia prasekolah (0-6 tahun). Secara kelembagaan BKB merupakan kelompok yang beranggotakan para orangtua yang memiliki anak usia 0-6 tahun. BKB merupakan kelompok swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh *kader*. Pada umumnya kader BKB sekaligus merupakan kader Posyandu.

1. *Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

Target Pendidikan Untuk Semua untuk program PAUD hasil kesepakatan adalah pada tahun 2015 sekitar 75% anak usia 3-6 tahun memperoleh akses layanan PAUD, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Sejak tahun 2000, akses ke PAUD untuk anak 3-6 tahun di Provinsi Jambi meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut seperti terlihat dari grafik di bawah ini. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD meningkat 51,10% pada tahun 2011 menjadi 53,57% di tahun 2012, meningkat 69,26% di tahun 2013 dan 71,61% di tahun 2015, artinya dari tahun 2011 sampai 2015 terjadi peningkatan 20,51%. Jumlah anak terlayani program PAUD juga mengalami peningkatan selama 5 tehun dari 85.42 orang anak pada tahun 2011 menjadi 197.229 orang anak pada tahun 2015 artinya terjadi kenaikan sebanyak 111.82 atau 56.69%.

Grafik 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Jambi
Tahun 2011 - 2015

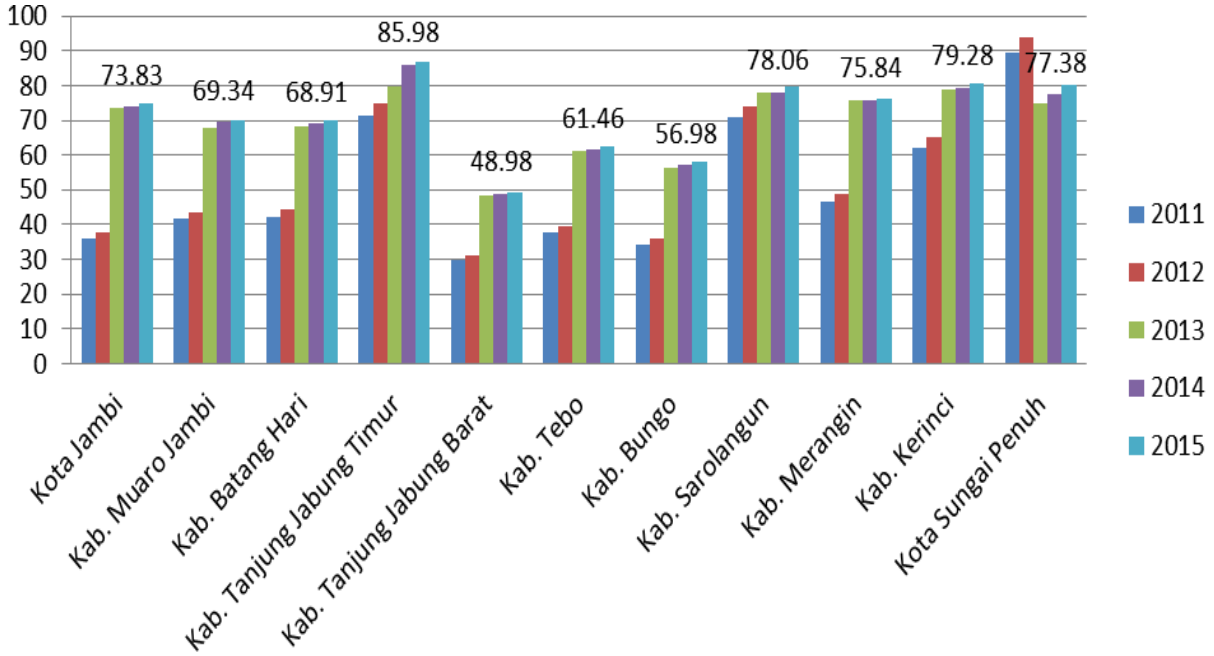

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 2
Jumlah Siswa PAUD Terlayani Provinsi Jambi
Tahun 2011 - 2015

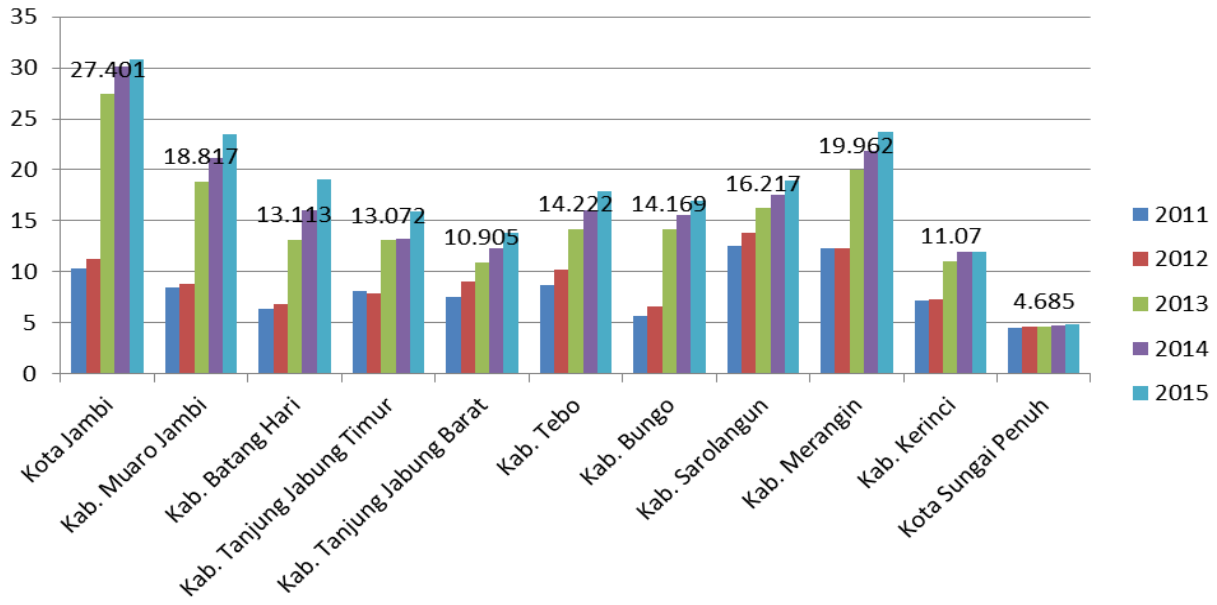

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 3
Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten/Kota
Tahun 2011 - 2015

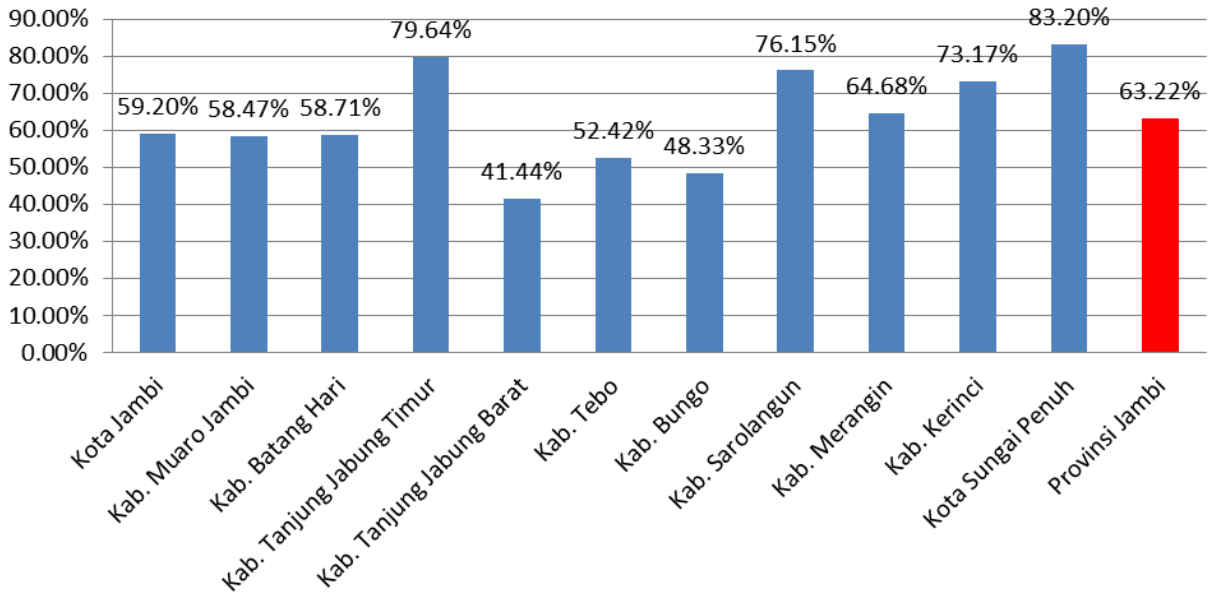

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 1
Perkembangan APK PAUD Umur 3-6 Tahun Per Kabupaten/Kota
Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	APK PAUD				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	36.08%	37.83%	73.33%	73.83%	74.92%
2	Kab. Muaro Jambi	41.66%	43.67%	67.84%	69.34%	69.82%
3	Kab. Batang Hari	42.14%	44.20%	68.41%	68.91%	69.91%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.26%	74.72%	79.66%	85.98%	86.59%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	29.62%	31.08%	48.15%	48.98%	49.35%
6	Kab. Tebo	37.72%	39.54%	60.96%	61.46%	62.43%
7	Kab. Bungo	34.38%	36.05%	56.31%	56.98%	57.93%
8	Kab. Sarolangun	70.78%	74.18%	77.82%	78.06%	79.91%
9	Kab. Merangin	46.73%	48.98%	75.70%	75.84%	76.13%
10	Kab. Kerinci	62.14%	65.14%	78.89%	79.28%	80.40%
11	Kota Sungai Penuh	89.59%	93.89%	74.79%	77.38%	80.36%
Provinsi Jambi		**51.10%**	**53.57%**	**69.26%**	**70.61%**	**71.61%**

Sumber : Disdik. Kemenag. dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Anak Umur 3-6 Tahun Terlayani PAUD
Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PAUD				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	10.385	11.284	27.401	30.176	30.78
2	Kab. Muaro Jambi	8.474	8.847	18.817	21.135	23.453
3	Kab. Batang Hari	6.368	6.792	13.113	16.06	19.007
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.141	7.862	13.072	13.211	15.893
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.495	9.075	10.905	12.339	13.773
6	Kab. Tebo	8.758	10.258	14.222	16.07	17.918
7	Kab. Bungo	5.621	6.656	14.169	15.543	16.917
8	Kab. Sarolangun	12.549	13.836	16.217	17.563	18.909
9	Kab. Merangin	12.254	12.254	19.962	21.823	23.684
10	Kab. Kerinci	7.195	7.274	11.07	11.992	12.003
11	Kota Sungai Penuh	4.543	4.651	4.685	4.789	4.893
Provinsi Jambi		**85.42**	**98.79**	**163.63**	**180.70**	**197.23**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Berdasarkan grafik 3 di atas, terdapat 5 kabupaten/kota memiliki APK PAUD selama 5 (lima) tahun berada di atas rata-rata provinsi, dan 6 kabupaten/kota lainnya berada di bawah rata-rata provinsi. APK PAUD tertinggi ada di Kota Sungai Penuh dengan nilai 83,20%, sedangkan APK terendah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 41,44%. Masalah dan tantangan utama yang dihadapi oleh 5 kabupaten/kota dengan APK berada di bawah rata-rata provinsi adalah karena tingkat kesadaran penduduk untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD serta kurangnya jumlah lembaga PAUD pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Meningkatnya APK PAUD Provinsi Jambi tidak terlepas dari meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara program PAUD dan desa yang memiliki setidaknya 1 desa satu lembaga PAUD. Hal tersebut terlihat pada grafik dibawah ini;

Tabel 3
Perkembangan jumlah lembaga PAUD berdasarkan Satuan PAUD
Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	413	448	372	448	470
2	Kab. Muaro Jambi	268	204	204	322	440
3	Kab. Batang Hari	208	245	238	245	314
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	286	266	266	299	297
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	170	164	164	233	278
6	Kab. Tebo	248	234	234	288	355
7	Kab. Bungo	178	242	232	242	244
8	Kab. Sarolangun	269	338	338	513	456
9	Kab. Merangin	174	342	322	342	387
10	Kab. Kerinci	232	304	304	337	340
11	Kota Sungai Penuh	116	106	106	139	118
Provinsi Jambi		**232.91**	**263.00**	**252.73**	**309.82**	**336.27**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

2. *Mutu Guru Pendidikan Anak Usia Dini*

PAUD yang berkualitas/bermutu tidak terlepas dari guru yang berkualitas. Untuk itulah sangat diperlukan guru yang berkualifikasi dan terlatih dengan jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Guru PAUD Berdasarkan Kualifikasi
Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	KUALIFIKSI PENDIDIKAN		TOTAL
		≤ S1	> S1	
1	Kota Jambi	556	672	1.228
2	Kab. Muaro Jambi			
3	Kab. Batang Hari	755	506	1.261
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	245	206	451
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.072	7	1.079
6	Kab. Tebo	834	358	1.192
7	Kab. Bungo	414	103	517
8	Kab. Sarolangun	2.165	6	2.171
9	Kab. Merangin	1.542	14	1.556
10	Kab. Kerinci	925	390	1.315
11	Kota Sungai Penuh	341	174	515
Provinsi Jambi		**8.293**	**1.764**	**10.057**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5 diatas, jumlah guru PAUD yang berkualifikasi ≥ S1 berjumlah 77 orang guru atau 0,26%, sedangkan guru yang berkualifikasi ≤ S1 berjumlah 29.474 orang guru atau 99,74%. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah guru yang berkualifikasi di Provinsi Jambi belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kualifikasi yang disyaratkan, yaitu minimal S1 bagi guru PAUD.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan anak usia dini, tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan yang ada. Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Pelayanan PAUD selama ini banyak dilakukan di daerah perkotaan. Untuk masyarakat pedesaan, program PAUD masih kurang, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD dan terkesan bahwa PAUD masih merupakan sesuatu yang mewah dan mahal;
2. Kebutuhan layanan PAUD belum disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, tantangan, dan potensi masyarakat maupun daerah;
3. Lembaga penyelenggara PAUD masih terbatas, khususnya di daerah pedesaan;
4. Tenaga pengelola PAUD masih perlu ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Sarana dan prasarana pendidikan PAUD masih kurang baik di dalam maupun di luar ruangan;
6. Data dan informasi PAUD masih belum tersusun secara baik dan akurat sehingga sering terjadi perbedaan data. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan program dan target PAUD yang kurang mantap karena belum didasarkan pada data yang lengkap dan akurat;
7. Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi logis otonomi daerah menyebabkan perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.

Secara internal, kekuatan penyelenggaraan PAUD ditentukan oleh hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah dan dukungan legislatif sangat baik dalam penyelenggaran PAUD. Hal ini terkait dengan adanya target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam *Millenium Development Goals* (MDGs);
2. Adanya semangat voluntarisme dan partisipasi masyarakat sebagai tutor atau pengajar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Adanya bantuan dana (*blockgrant*) kepada lembaga-lembaga penyelenggara;
4. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain;
5. Dukungan anggaran yang makin baik dan semakin bertambah sehingga menjangkau jumlah sasaran program Pendidikan Anak Usia Dini yang besar dan bervariasi.

Sementara itu, berbagai kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Jumlah anak usia dini yang masih cukup besar yang harus dilayani tidak sebanding dengan ketersediaan dana, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD yang tersedia;
2. Data/infomasi PAUD yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga menjadi kendala dalam perencanaan program baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Program layanan PAUD pada umumnya baru memberikan layanan bagi anak usia 4 tahun ke atas dan sebagian besar lembaga layanan PAUD tersebut berada di daerah perkotaan;
4. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD pada umumnya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sebagian dari mereka bekerja secara sukarela (*volunteer*);
5. Program Pelayanan Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini, belum dilaksanakan secara holitistik dan integratif (terpadu);
6. Koordinasi antar lembaga, organisasi yang terkait dengan pelayanan anak usia dini, belum optimal;
7. Sosialisasi, promosi dan edukasi tentang pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini belum merata, terutama bagi keluarga, orang tua dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sulit.

Beberapa tantangan yang harus dicermati dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagian besar PAUD hingga saat ini banyak dikelola oleh swasta, hal ini menunjukkan bahwa banyak orangtua yang dengan sengaja memasukkan anaknya (kelompok usia PAUD) ke kelas 1 SD dengan tujuan memangkas biaya pendidikan;
2. Jumlah pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 masih sangat terbatas. Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi remunerasi yang ditetapkan oleh pemilik lembaga (bagi PAUD swasta) sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas program PAUD yang diselenggarakan di daerah tersebut;
3. Masih belum banyak masyarakat mengetahui tentang pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi keluarga, orangtua dan masyarakat di daerah tertentu;
4. Masih terbatasnya perhatian dan dukungan Pemerintah Kab/Kota untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

B. PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak.

Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs).

Program Pendidikan Dasar dilaksanakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2015, semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk dalam minoritas etnik, mempunyi akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. Pendidikan Dasar di Provinsi Jambi dilaksanakan melalui wajib belajar sembilan tahun meliputi layanan pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun melalui 6 tahun di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Paket A (setara dengan SD), serta 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Paket B (Setara dengan SMP). SD, SMP, Paket A dan B dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan MI dan MTs dilaksanakan dibawah naungan Kementerian Agama dan dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

1. Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Dasar

Akses dan partisipasi ke pendidikan dasar dapat dilihat melalui angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) SD dan SMP sederajat. Perkembangan akses dan partisipasi pendidikan dasar dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:

Grafik 4
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Provinsi
Tahun 2011 – 2015.

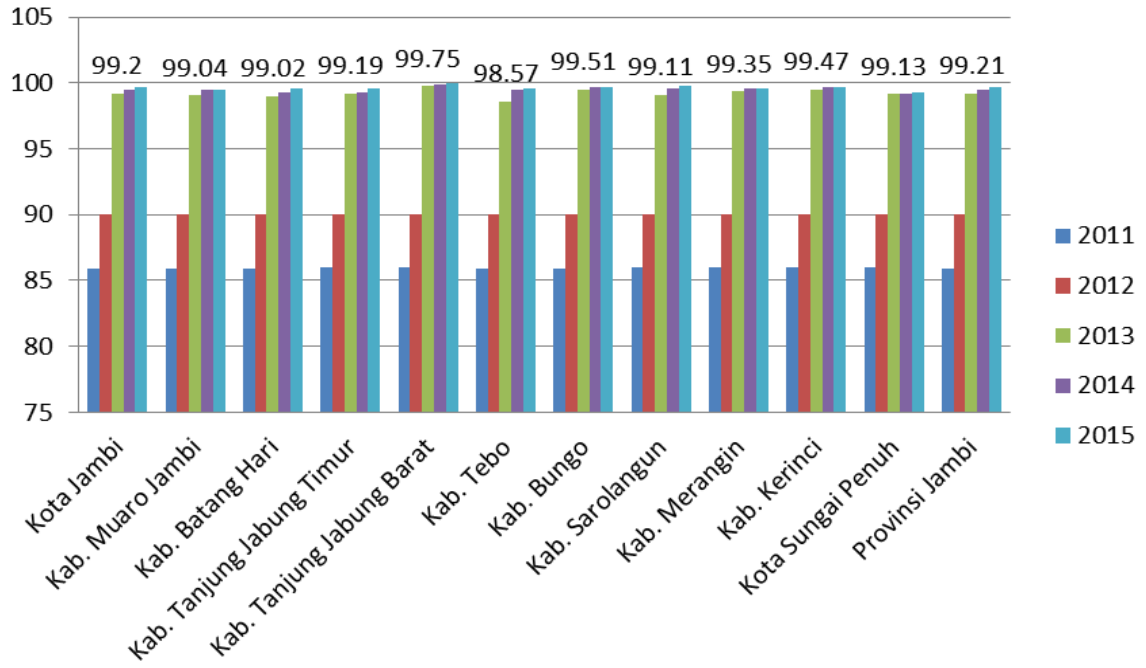

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 5
APK SMP/MTs/Paket B Provinsi
Tahun 2011 – 2015.

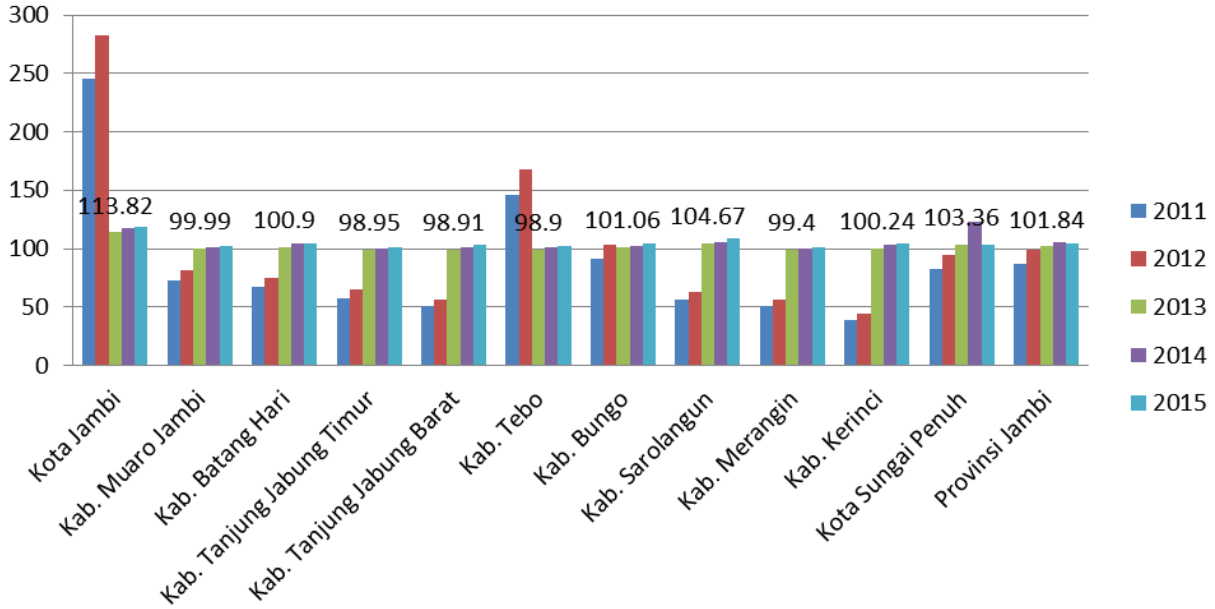

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 6
Perkembangan APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota
Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	85.92	89.99	99.2	99.52	99.73
2	Kab. Muaro Jambi	85.92	89.99	99.04	99.48	99.53
3	Kab. Batang Hari	85.94	90.01	99.02	99.24	99.59
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	85.95	90.02	99.19	99.27	99.57
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	85.95	90.02	99.75	99.9	99.96
6	Kab. Tebo	85.94	90.01	98.57	99.46	99.59
7	Kab. Bungo	85.93	89.99	99.51	99.67	99.69
8	Kab. Sarolangun	85.95	90.02	99.11	99.63	99.76
9	Kab. Merangin	85.97	90.04	99.35	99.57	99.59
10	Kab. Kerinci	85.98	90.05	99.47	99.67	99.72
11	Kota Sungai Penuh	85.96	90.03	99.13	99.19	99.26
12	**Provinsi Jambi**	**85.95**	**90.02**	**99.21**	**99.51**	**99.64**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 7
Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten/Kota
Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	245.9	282.62	113.82	117.06	118.85
2	Kab. Muaro Jambi	72.82	81.89	99.99	101.13	102.02
3	Kab. Batang Hari	66.84	74.77	100.9	103.91	104.3
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	57.65	65.06	98.95	100.21	101.1
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	50.45	56.1	98.91	101.39	102.97
6	Kab. Tebo	146.03	167.61	98.9	101.65	102.27
7	Kab. Bungo	91.75	102.89	101.06	102.24	104.62
8	Kab. Sarolangun	56.05	63.34	104.67	105.87	108.65
9	Kab. Merangin	50.38	56.3	99.4	100.21	101.09
10	Kab. Kerinci	38.79	43.75	100.24	103.39	103.98
11	Kota Sungai Penuh	82.61	94.95	103.36	122.79	103.41
12	**Provinsi Jambi**	**87.21**	**99.03**	**101.84**	**105.44**	**104.84**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Pada tahun 2015 capaian APM SD/MI/Paket A sebesar 99,64%, mengalami peningkatan 0,13% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 capaian APM SD/MI/Paket A sebesar 85,95%, meningkat menjadi 90,02% pada tahun 2012 dan 99,64% pada tahun 2015.

Sedangkan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2015 adalah sebesar 104,84%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 capaian APK SMP/MTs/Paket B sebesar 87,21%, meningkat menjadi 99,03% pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 menjadi 104,84%. Dapat disimpulkan bahwa capaian APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2015 telah mengalami peningkatan yang cukup baik dan signifikan.

Pada Grafik 4, terdapat 5 kabupaten memiliki APM SD/MI/Paket A berada di atas rata-rata provinsi yaitu sebesar 99,21% sedangkan 6 kabupaten/kota berada di bawah rata-rata provinsi, antara lain Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Sarolangun dan Kota Sungai Penuh.

Tabel 8
Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar per kabupaten/kota
Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	364	391	372	448	470
2	Kab. Muaro Jambi	400	345	204	322	440
3	Kab. Batang Hari	308	324	238	245	314
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	316	263	266	299	297
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	349	270	164	233	278
6	Kab. Tebo	382	352	234	288	355
7	Kab. Bungo	441	315	232	242	244
8	Kab. Sarolangun	361	285	338	513	456
9	Kab. Merangin	442	436	322	342	387
10	Kab. Kerinci	335	293	304	337	340
11	Kota Sungai Penuh	100	83	106	139	118
12	**Provinsi Jambi**	**345.27**	**305.18**	**252.73**	**309.82**	**336.27**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 6
Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar per kabupaten/kota
Tahun 2011 – 2015.

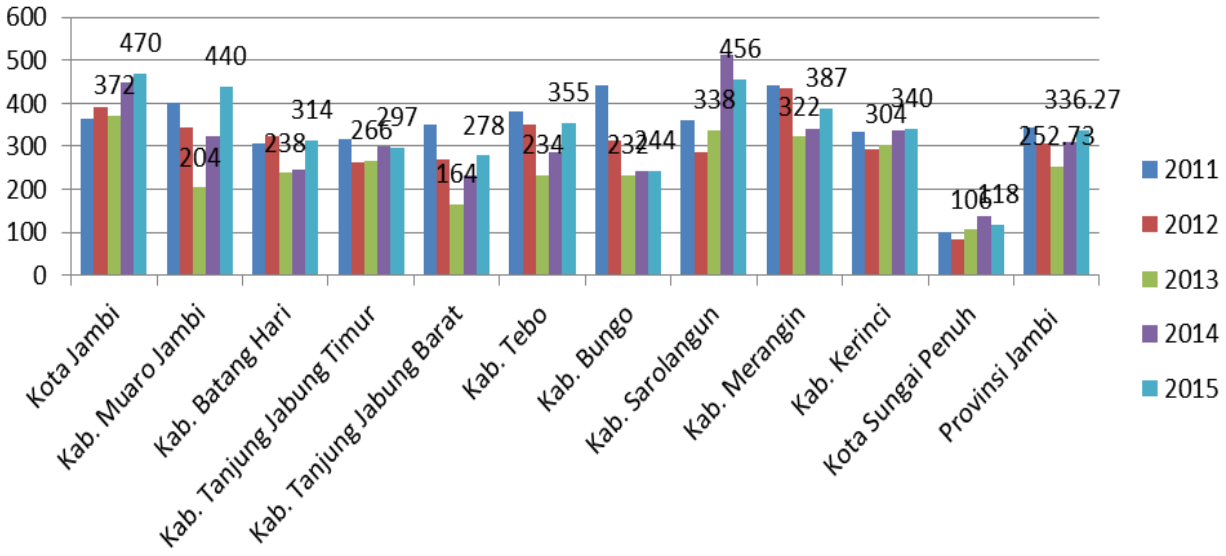

Tabel 9
Jumlah Siswa Pendidikan Dasar per kabupaten/kota
Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	9900	71510	105278	11363	121406
2	Kab. Muaro Jambi	5388	65339	63209	6431	67173
3	Kab. Batang Hari	4264	33768	45561	49404	52761
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	3590	40535	36563	37385	38824
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	4743	13979	41643	55783	5855
6	Kab. Tebo	5626	60500	60233	61691	64133
7	Kab. Bungo	5504	60822	6253	64891	67728
8	Kab. Sarolangun	4559	48084	51723	53107	54582
9	Kab. Merangin	13541	58113	66584	69785	71785
10	Kab. Kerinci	3861	15692	3702	38074	37036
11	Kota Sungai Penuh	1448	14635	14998	16257	16867
12	**Provinsi Jambi**	**5674.9**	**43907.0**	**45067.9**	**42197.4**	**54377.3**

Grafik 7
Jumlah Siswa Pendidikan Dasar per kabupaten/kota
Tahun 2011 – 2015.

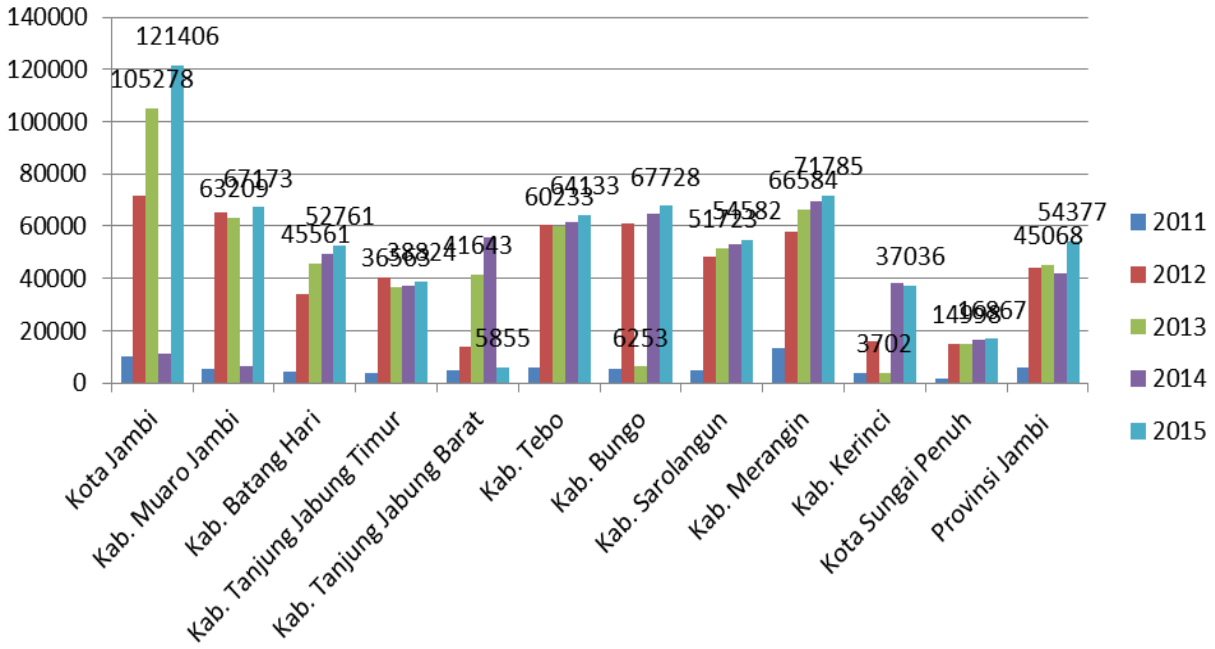

Dari total jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dasar, sekitar 70% bersekolah di lembaga yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan sisanya yaitu 30% bersekolah di lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B diharapkan menjadi pendidikan alternatif untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah melalui jalur pendidikan nonformal. Perkembangan jumlah siswa Paket A dan B dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah siswa paket A sebanyak 2.200 orang dan pada tahun 2015 menjadi 1.744 orang.

Sedangkan untuk Paket B mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2011 jumlah siswanya sebanyak 9.923 orang dan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 tetap sebanyak 11.226 orang. Sementara pada tahun 2015, jumlah siswa paket B sebanyak 5.392 orang.

Tabel 10
Jumlah Siswa Paket A dan Paket B per kabupaten/kota
Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011		2012		2013		2014		2015	
		Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B
1	Kota Jambi	121	600	141	747	141	747	141	747	56	404
2	Kab. Muaro Jambi	201	963	141	129	151	129	151	129	92	78
3	Kab. Batang Hari	200	350	239	1046	239	1046	239	1046	89	262
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	100	980	66	1273	66	1273	66	1273	156	520
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	260	1120	265	1339	265	1339	265	1339	62	1683
6	Kab. Tebo	226	1000	266	1284	266	1284	266	1284	0	462
7	Kab. Bungo	183	860	194	1066	194	1066	194	1066	112	362
8	Kab. Sarolangun	200	1035	231	1286	231	1286	231	1286	49	344
9	Kab. Merangin	344	1240	327	1485	327	1485	327	1485	259	103
10	Kab. Kerinci	220	1065	180	1113	180	1113	180	1113	764	634
11	Kota Sungai Penuh	145	710	102	458	102	458	102	458	105	540
12	**Provinsi Jambi**	**2200**	**9923**	**2152**	**11226**	**2162**	**11226**	**2162**	**11226**	**1744**	**5392**

Sumber : Disdik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

2. Mutu Guru Pendidikan Dasar

Salah satu faktor penting dari Pendidikan Dasar yang bermutu adalah Pendidik yang terlatih dan berkualitas. Untuk itulah sangat diperlukan guru yang berkualifikasi dan terlatih dengan jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pendidikan yang diberikan di SD amat penting bagi pendidikan selanjutnya. Pada umur anak yang sekolah SD terbentang peluang paling baik untuk mengembangkan dan memotivasi timbulnya berbagai kemampuan yang amat mendasar. Sebaliknya apabila terjadi pendidikan yang menumpulkan pikiran dan perasaan anak didik SD, hasilnya yang negatif amat sukar diperbaiki pada pendidikan selanjutnya.

Di negara mana saja kita melihat bahwa pada pendidikan di SD menonjol fungsi Guru Kelas, yaitu Guru yang bertanggungjawab atas kelas tertentu dan mengajarkan semua mata pelajaran yang ditetapkan untuk kelas itu. Tentu pengaturan demikian ada maksudnya yang telah kita alami semua ketika menjadi murid SD. Anak

pada tahap permulaan penguasaan ilmu pengetahuan lebih mudah mencernakan pelajaran, apabila ia merasakan bahwa yang mengajar adalah seorang yang dekat kepadanya. Guru Kelas yang setiap hari selama berjam-jam berada bersama dengan murid kelasnya menimbulkan rasa kedekatan itu. Selain itu Guru Kelas memperkuat perasaan itu dengan menunjukkan sikap bahwa ia memang ingin dekat dengan setiap murid kelasnya. Ini memerlukan pengetahuan Guru Kelas tentang psikologi dan terutama aplikasinya. Sudah semestinya pendidikan mengandung kemampuan memimpin secara efektif.

Kemudian Guru Kelas harus menguasai ilmu pengetahuan yang mendasari semua mata pelajaran yang harus diajarkan. Itu melebar dari ilmu sosial, ilmu bahasa, geografi, sejarah, biologi, matematika, fisika hingga olahraga. Hanya pendidikan agama sebaiknya tidak diberikan oleh Guru Kelas, karena di dalam kelas pasti ada murid yang berbeda agamanya. Meskipun ada Guru Agama tersendiri, namun Guru Kelas tetap mempunyai kewajiban untuk memperkuat pendidikan budi pekerti kepada anak didiknya.

Tabel 11
Perkembangan Jumlah Guru SD dan Sederajat Berdasarkan Kualifikasi per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	3019	2652	2904	2956	2916
2	Kab. Muaro Jambi	1684	1735	1735	1735	1699
3	Kab. Batang Hari	615	1011	1019	1098	1273
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	896	1098	1262	1357	1528
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3948	3972	3972	4357	4357
6	Kab. Tebo	1135	581	874	682	1188
7	Kab. Bungo	1320	1656	1660	1248	1016
8	Kab. Sarolangun	945	806	806	875	2157
9	Kab. Merangin	3238	1915	1965	2261	2379
10	Kab. Kerinci	159	159	159	159	1948
11	Kota Sungai Penuh	632	381	686	553	553
12	**Provinsi Jambi**	**17591**	**15966**	**17042**	**17281**	**21014**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 12
Perkembangan Jumlah Guru SMP dan Sederajat Berdasarkan Kualifikasi per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	1309	1309	1310	1349	1406
2	Kab. Muaro Jambi	716	716	716	716	697
3	Kab. Batang Hari	550	586	586	595	686
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	679	654	757	678	637
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	681	1356	1356	1179	1179
6	Kab. Tebo	268	622	821	811	811
7	Kab. Bungo	611	606	648	663	603
8	Kab. Sarolangun	527	520	523	667	735
9	Kab. Merangin	565	567	571	675	752
10	Kab. Kerinci	390	380	380	380	380
11	Kota Sungai Penuh	624	708	690	460	460
12	**Provinsi Jambi**	**6920**	**8024**	**8358**	**8173**	**8346**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2015 jumlah guru SD yang berkualifikasi berkualifikasi ≤S1 berjumlah 21.014 orang guru dan guru SMP yang berkualifikasi ≤S1 berjumlah 8.346 orang guru atau 23,27. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah guru yang berkualifikasi di Provinsi Jambi dapat dikatakan mendekati sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kualifikasi yang disyaratkan.

C. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH)

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, prioritas utama pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan dari mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi/universitas menjadi mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan ini berubah dalam rangka meningkatkan keterampilan para pemuda/I Indonesia untuk selanjutnya menjadi tenaga kerja terampil.

Ada beberapa aspek dalam Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*), yaitu : pertama, Kemampuan Khusus (*Generik Life Skills*) yang lebih

cenderung pada psychososial education, yang memuat Kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk lingkungan, kemampuan sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, dan nilai-nilai sikap seperti disiplin, tanggungjawab, jujur dan santun. Kedua, Kemampuan Khusus (*Specific Life Skills*) yaitu kemampuan penguasaan pengetahuan (*Science Academic*) dan Kemampuan penguasaan keterampilan kejuruan (*Vocational*), yang terkait dengan aktifitas pekerjaan dalam mempertahankan hidup dan kehidupan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka program pendidikan diorientasikan atau berorientasi pada *Life Skills* di semua jenjang pendidikan baik itu persekolahan maupun pendidikan luar sekolah secara terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan untuk (a) mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata di lingkungannya sehari-hari, (b) menumbuhkan kesadaran tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan lingkungan, kesadaran akan makna/nilai kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat dan memiliki daya proteksi terhadap pandemic HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkoba, (c) penanaman penguasaan keterampilan vokasional, (d) memacu kreatifitas, dan (e) mengembangkan peran sosial, (f) mengembangkan nilai-nilai sikap rasa percaya diri, tanggungjawab, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship) yang baik, (g) menguasai science academic yang merupakan basis pengembangan teknologi.

Mengacu pada tujuan akhir yang diharapkan tersebut, maka orientasi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan lebih fokus sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing institusinya, sebagaimana tercermin di bawah ini.

Life Skills pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal saat ini telah dilaksanakan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK dan RA), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Life skills pada jenjang pendidikan dasar ditekankan pada Generic Life skills yang menekankan pada pengembangan kemampuan Psicho-sosial dan pendidikan karakter, dengan maksud memberikan fondasi atau dasar-dasar yang kuat dalam rangka menghadapi peran dan kehidupan yang akan datang.

Life skills pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/MA, ditekankan pada *Specific Life skills* dengan fokus *Academic Skills (Science)* dan *Generic Life skills*

termasuk Psiko-sosial, *Vocational Skill* harus diberikan di SMA/MA sebagai bekal antisipasi memasuki dunia kerja apabila tidak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi atau putus sekolah.

Life skills pada SMK, ditekankan pada penguasaan *Vocational Skills* dan *Generic Skills* termasuk Psiko-sosial. Sedangkan *Academic Skill* diberikan di SMK adalah *science academic* yang terkait langsung dengan penguasaan teknologi dan sebagai antisipasi bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan, ke jenjang pendidikan profesional yang lebih tinggi.

Life skills pada pendidikan luar sekolah difokuskan pada penyiapan warga belajar untuk bisa bekerja, dan berusaha mandiri, bersikap dan berperilaku positif, serta memiliki daya proteksi terhadap pandemik HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba serta kehamilan pada usia dini yang tidak diinginkan.

Pendidikan formal menydiakan pendidikan teknik dan kejuruan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan pendidikan nonformal menyediakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan melalui: (a) Lembaga Kursus dan Pelatihan pendidikan non-formal, (b) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (c) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (BP-PNFI), (d) Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), (e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), (f) Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, yayasan yang menangani pendidikan nonformal, dll, (g) Lembaga Pengabdian masyarakat (LPM) pada perguruan tinggi yang peduli pendidikan nonformal, (h) organisasi kepemudaan, yayasan dan koperasi yang menangani pemuda.

Penanggungjawab pengelolaan program PKH terdiri atas empat unsur: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/desa), (c) Lembaga Swadaya Masyarakat,(d) masyarakat lokal. Pengelolaan program meliputi pelaksanaan fungsi pengelolaan pendidikan yang terkait dengan: (a) pengembangan kurikulum, (b) pengembangan, produksi, dan distribusi bahan belajar (buku dan modul), (c) bantuan teknis pengembangan kegiatan belajar, (d) pengelolaan pelatihan tenaga pendidik. Sedangkan pengelolaan sumber daya terdiri atas pengelolaan tenaga kependidikan, sistem informasi, partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, serta kegiatan sosialisasi, advokasi dan evaluasi.

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan

Pendidikan Menengah adalah lingkaran penting yang dapat membantu mengantarkan akses yang sama terhadap pembelajaran juga program keterampilan yang sesuai. Pendidikan Dasar tidak lagi cukup untuk memberikan para pemuda/i kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Perubahan jaman dan kemajuan teknologi yang cukup pesat membutuhkan para pemuda/i dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Grafik 8
Persentase Siswa SMP Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 – 2015

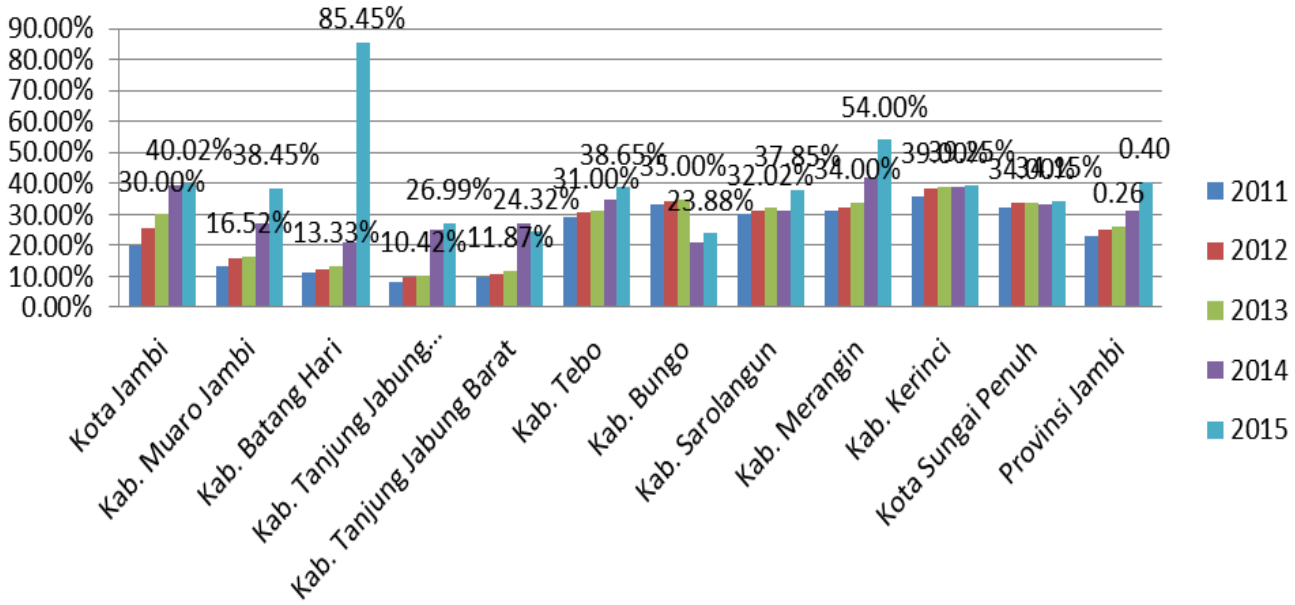

Tabel 13
Persentase Siswa SMP Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	20.05%	25.54%	30.00%	39.15%	40.02%
2	Kab. Muaro Jambi	13.42%	15.68%	16.52%	27.20%	38.45%
3	Kab. Batang Hari	11.30%	12.25%	13.33%	20.82%	85.45%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.40%	9.60%	10.42%	24.99%	26.99%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	9.60%	10.58%	11.87%	26.97%	24.32%
6	Kab. Tebo	29.05%	30.65%	31.00%	35.00%	38.65%
7	Kab. Bungo	33.20%	34.15%	35.00%	21.00%	23.88%
8	Kab. Sarolangun	30.02%	31.25%	32.02%	31.25%	37.85%
9	Kab. Merangin	31.00%	32.20%	34.00%	42.00%	54.00%
10	Kab. Kerinci	35.85%	38.25%	39.00%	39.00%	39.25%
11	Kota Sungai Penuh	32.25%	33.68%	34.00%	33.00%	34.15%
12	**Provinsi Jambi**	**23.10%**	**24.89%**	**26.11%**	**30.94%**	**40.27%**

Dari grafik 6 di atas, persentase siswa SMP yang melanjutkan ke SMK meningkat dari 23,10% pada tahun 2011 menjadi 30,94% pada tahun 2014, dan 40,27% pada tahun 2015.

Sejalan dengan peningkatan siswa yang melanjutkan ke SMK, jumlah lembaga SMK juga mengalami peningkatan yaitu 163 lembaga pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan signifikan afirmasi dan dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat untuk pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan hidup.

Tabel 14
Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Jenis Kelamin
Per kabupaten/kota Tahun 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015		
		L	P	JML
1	Kota Jambi	8.987	4.550	13.537
2	Kab. Muaro Jambi	2.145	2.858	5.003
3	Kab. Batang Hari	1.150	1.059	2.209
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	859	502	1.361
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.531	1.160	2.691
6	Kab. Tebo	859	785	1.644
7	Kab. Bungo	2.086	1.407	3.493
8	Kab. Sarolangun	2.285	2.051	4.336
9	Kab. Merangin	1.999	1.461	3.460
10	Kab. Kerinci	740	967	1.707
11	Kota Sungai Penuh	1.157	658	1.815
12	**Provinsi Jambi**	**23.798**	**17.458**	**41.256**

Sumber : Disdik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 9
Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Jenis Kelamin
Per kabupaten/kota Tahun 2015

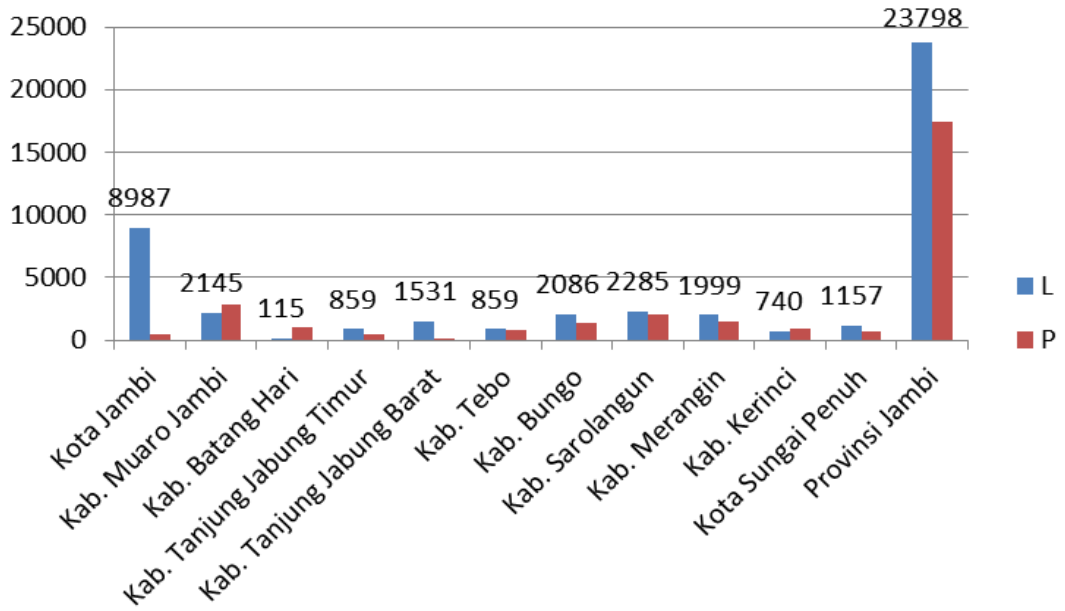

Secara umum, partisipasi siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih didominasi oleh laki-laki, hal ini seperti terlihat pada tabel 14 diatas. Jumlah siswa laki-laki SMK sebesar 23.798 Siswa atau 57,68% sedangkan jumlah siswa perempuan hanya sebesar 17.458 siswa atau 42,32% dari total siswa.

Beberapa program keahlian yang dilaksanakan oleh SMK antara lain pertanian, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, perhotelan, pariwisata, kesenian, kerajinan, kehutanan dan maritim, serta program lainnya.

Tingkat pendidikan angkatan kerja, meskipun lambat laun terus meningkat, secara relatif masih rendah. Pada tahun 2015 Lebih dari 43,92% angkatan kerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar, sedangkan yang berkualifikasi lulusan SMA/SMK sekitar 26,07%. Sebagian besar merupakan akibat dari keterbatasan akses ke pendidikan menengah dan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tantangannya terletak pada penyediaan peluang pembelajaran sepanjang hayat bagi angkatan kerja yang perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka seiring dengan tantangan dan tuntutan dunia kerja.

Tabel 15
Jumlah Angkatan Kerja
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	Jenjang Pendidikan			
		<=SD	SMP	SMA	DI/II/III/ Akademi/ Universitas
1	Kota Jambi	42.482	38.577	72.220	62.805
2	Kab. Muaro Jambi	71.194	40.941	48.865	14.959
3	Kab. Batang Hari	92.078	41.168	34.568	9.204
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	69.074	17.845	15.070	4.793
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	76.977	28.004	42.717	-
6	Kab. Tebo	87.122	37.567	32.411	12.092
7	Kab. Bungo	42.710	30.580	42.320	1.441
8	Kab. Sarolangun	67.758	24.476	31.347	13.207
9	Kab. Merangin	52.910	23.120	35.462	14.401
10	Kab. Kerinci	62.249	20.381	31.896	11.229
11	Kota Sungai Penuh	12.278	6.430	14.916	9.248
12	**Provinsi Jambi**	**676.832**	**309.089**	**401.792**	**153.379**

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Grafik 10
Jumlah Angkatan Kerja
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015

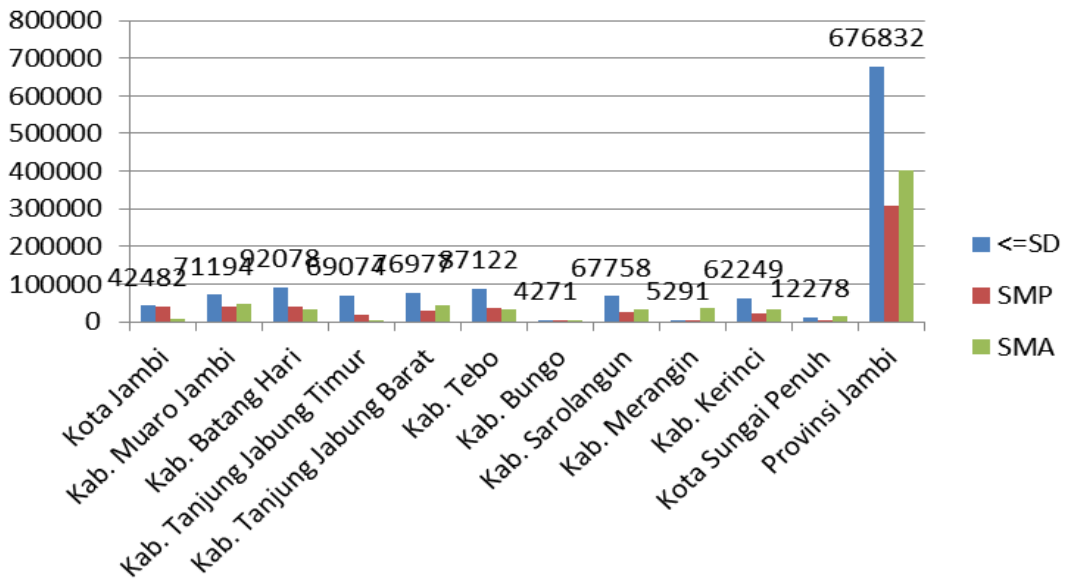

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di provinsi mengidentifikasi rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak berorientasi keterampilan menjadi faktor utama rendahnya daya saing dan kinerja. Selain itu hambatan utama datang dari kurangnya peluang peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Begitu juga halnya dengan kurang tersedianya peluang kursus atau pelatihan dan pendidikan menengah di pedesaan menjadi hambatan program diversifikasi ekonomi dan produktivitas angkatan kerja non pertanian.

Tabel 16
Jumlah Pengangguran Terbuka per kabupaten/kota
Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015
1	Kota Jambi	23.912
2	Kab. Muaro Jambi	9.51
3	Kab. Batang Hari	4.003
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.536
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.96
6	Kab. Tebo	3.28
7	Kab. Bungo	4.617
8	Kab. Sarolangun	6.202
9	Kab. Merangin	3.29
10	Kab. Kerinci	4.615
11	Kota Sungai Penuh	3.508
12	**Provinsi Jambi**	**68.433**

Sumber : BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 11
Jumlah Pengangguran Terbuka per kabupaten/kota
Tahun 2015

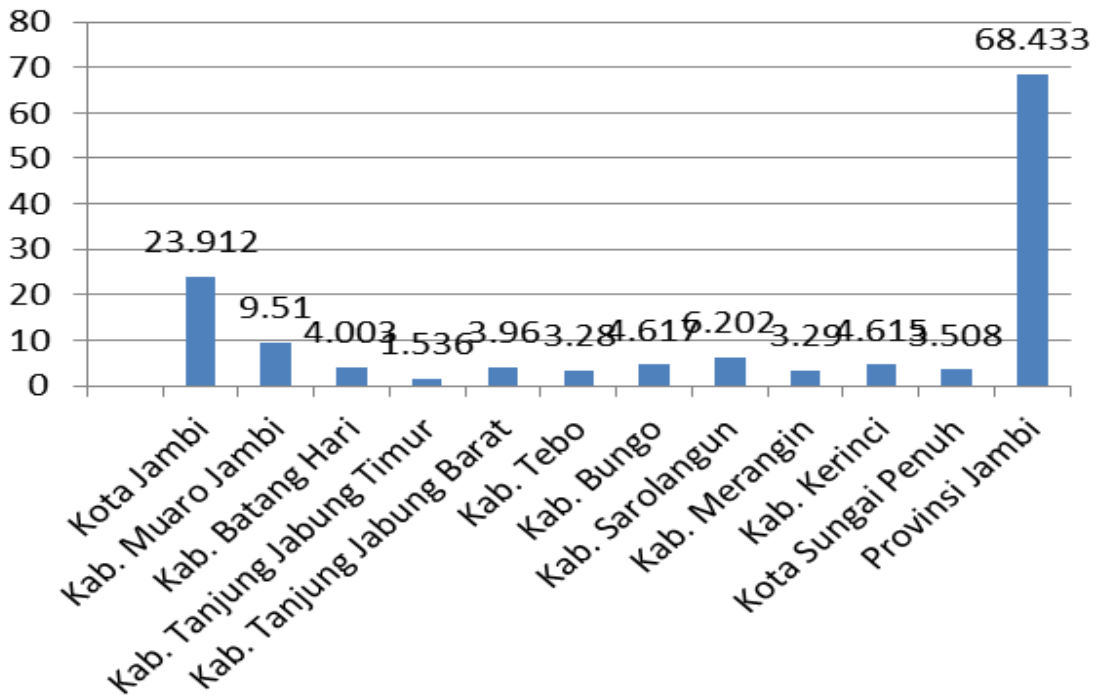

Kurangnya jumlah lulusan sekolah menengah atas/sederajat dan perguruan tinggi yang bermutu serta rendahnya mutu/kompatibilitas program pendidikan wirausaha/bisnis di sekolah dan universitas juga dianggap sebagai faktor yang menghambat pembangunan *Small Medium Enterprise* (usaha kecil, menegah, dan mikro) di pedesaan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penghasilan angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan yang miskin adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus dan pelatihan yang sesuai dengan potensi pedesaan sehingga mereka dapat bekerja atau berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.

Langkah awal yang penting untuk memfasilitasi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan sepanjang hayat adalah dengan meningkatkan angka melanjutkan ke pendidikan menengah. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP ke SMA telah mendorong peningkatan kinerja nasional. Dalam jangka panjang, meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah yang berkualitas memungkinkan peningkatan angka melanjutkan baik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bentuk-bentuk kursus dan pelatihan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah kejuruan dan pendidikan teknik.

Pemerintah provinsi juga telah berupaya memperkuat orientasi kecakapan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan cara mengaitkannya dengan aspek-aspek lingkungan, HIV/AIDS, kewarganegaraan dan aspek sosial dalam memperbaiki kurikulum sekolah dan ujian. Dengan demikian, sekolah terdorong untuk memasukkan komponen lokal kedalam kurikulum sebagai bagian dari desentralisasi kurikulum dan tanggapan bagi konteks lokal dan lingkungan. Sekolah juga terdorong untuk bekerja sama dengan sektor-sektor lain, seperti kesehatan, lingkungan, industri, dan perdagangan baik dalam kegiatan inti ataupun ekstrakurikuler. Dalam beberapa kasus, sekolah terdorong untuk memanfaatkan dana sekolah dalam memfasilitasi kegiatan kecakapan hidup dalam sebuah program unggulan/inti.

Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, pemerintah menyediakan dukungan anggaran. Pada jalur pendidikan sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan di PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan dalam bentuk kursus, pelatihan, pemagangan kelompok belajar, dan berbagai kegiatan pembelajaran

lain yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan luar sekolah yang sekarang menunjukkan peningkatan dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup adalah: lembaga kursus, lembaga pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Balai Pengembangan PAUDNI, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga/organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, industri, sanggar, majelis ta"lim, dan lembaga lain sejenisnya, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Perguruan Tinggi yang peduli pendidikan nonformal dan informal.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan langkah penting dalam menyediakan alternatif pendidikan bagi para pemuda/I dan orang dewasa yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Pada pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup (PKH) diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program yang dilaksanakan antara lain: PKH, PKH untuk wanita, aksara kewirausahaan mandiri, serta berbagi jenis kursus dan pelatihan lainnya.

Tabel 17
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Tahun 2011 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	224	253	267	267	267
2	Kab. Muaro Jambi	16	4	16	16	16
3	Kab. Batang Hari	22	22	22	22	22
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	27	27	27	27	27
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	33	33	33	33	33
6	Kab. Tebo	41	60	60	60	65
7	Kab. Bungo	78	41	27	30	45
8	Kab. Sarolangun	33	33	34	15	16
9	Kab. Merangin	80	80	80	25	25
10	Kab. Kerinci	163	170	182	197	197
11	Kota Sungai Penuh	44	37	33	27	22
12	**Provinsi Jambi**	**761**	**760**	**781**	**719**	**735**

Sumber : BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 12
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Tahun 2011 - 2015

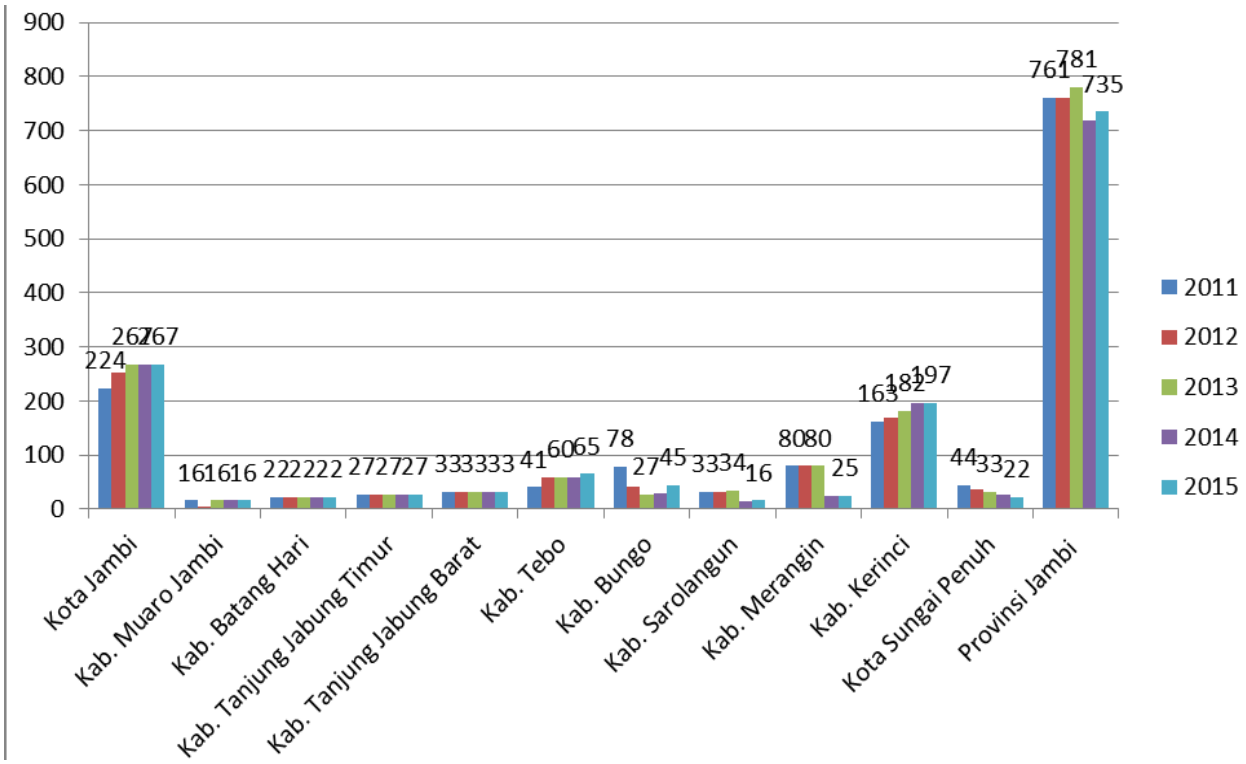

Tabel 18
Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	775	2900	3300	3466	7327
2	Kab. Muaro Jambi	466	458	494	508	186
3	Kab. Batang Hari	94	192	181	299	254
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	169	194	474	797	685
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	127	61	105	160	193
6	Kab. Tebo	180	220	240	240	300
7	Kab. Bungo	99	99	580	620	765
8	Kab. Sarolangun	160	200	204	180	145
9	Kab. Merangin	424	487	554	476	732
10	Kab. Kerinci	424	382	1226	977	1526
11	Kota Sungai Penuh	1322	958	998	1012	1182
12	**Provinsi Jambi**	**4240**	**6151**	**8356**	**8735**	**13295**

Grafik 13
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Tahun 2011 - 2015

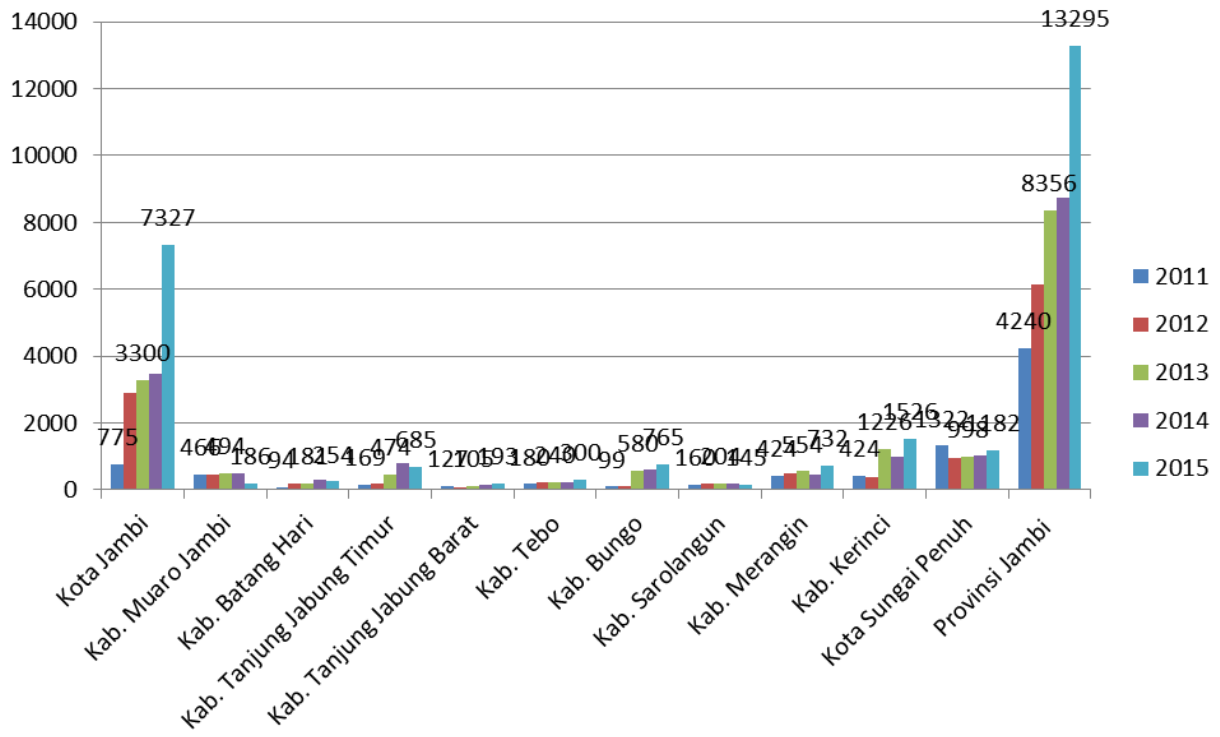

Tabel 19
Jumlah Lembaga PKBM
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	20	25	19	23	32
2	Kab. Muaro Jambi	12	12	21	26	27
3	Kab. Batang Hari	13	13	7	13	11
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	9	9	15	16	17
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	15	15	26	28	29
6	Kab. Tebo	15	25	14	14	28
7	Kab. Bungo	10	10	20	20	20
8	Kab. Sarolangun	14	14	22	23	30
9	Kab. Merangin	41	41	41	29	25
10	Kab. Kerinci	73	80	82	97	97
11	Kota Sungai Penuh	15	15	36	36	36
12	**Provinsi Jambi**	**237**	**259**	**303**	**325**	**352**

Grafik 14
Jumlah Lembaga PKBM
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

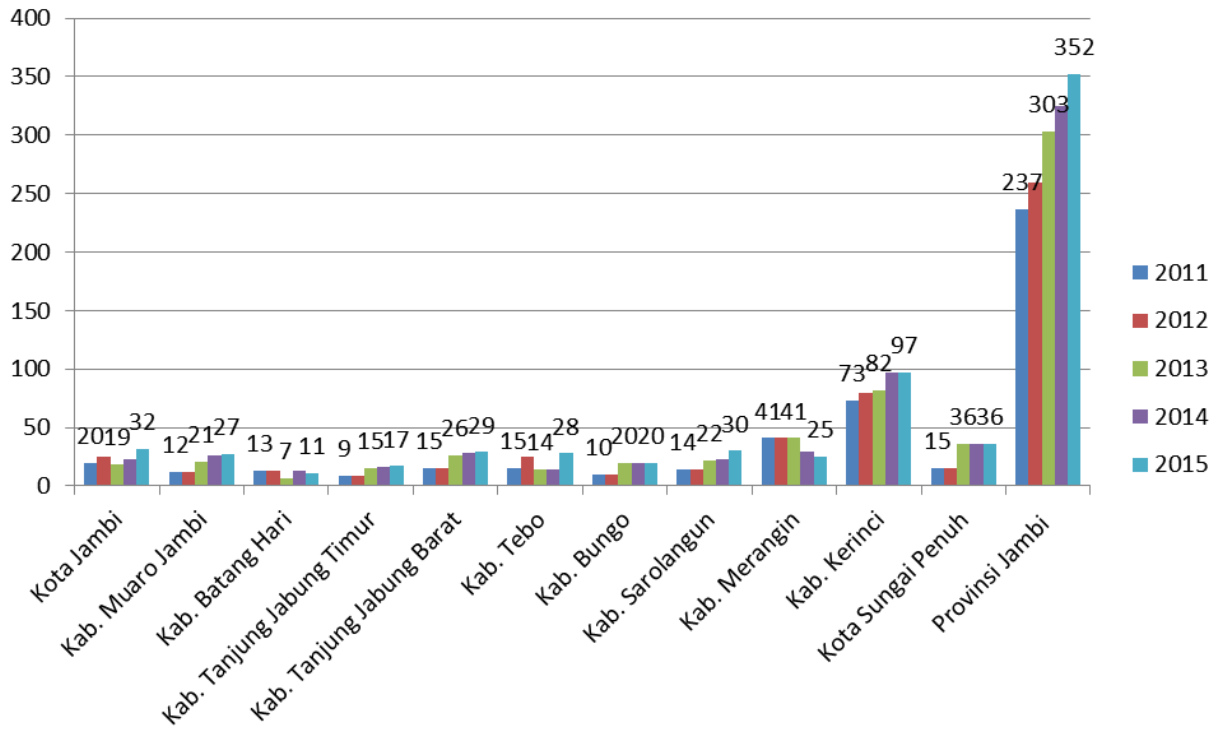

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah lembaga kursus dan pelatihan serta PKBM meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah lembaga kursus dan pelatihan sebesar 237 lembaga, jumlah tersebut meningkat menjadi 259 lembaga pada tahun 2012 dan 303 Lembaga pada tahun 2013. Sedangkan jumlah lembaga PKBM pada tahun 2014 sebesar 325 lembaga, meningkat menjadi 352 lembaga pada tahun 2015.

Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan juga meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah peserta didik adalah sebesar 4.240 orang, meningkat menjadi 13.295 orang pada tahun 205.

Beberapa jenis keterampilan yang dilaksanakan pada pendidikan nonformal antara lain: komputer, Bahasa inggris, menjahit, tata rias rambut, tata kecantikan kulit, dan keterampilan lainnya.

Tabel 20
Jumlah dan Persentase Pengangguran Yang Terlayani PKH
Tahun 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015	
		JML	% Tase
1	Kota Jambi	23.912	8,74%
2	Kab. Muaro Jambi		
3	Kab. Batang Hari	4.003	3,38%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.486	2,69%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.96	5,86%
6	Kab. Tebo	60	33,33%
7	Kab. Bungo	1.154	24,80%
8	Kab. Sarolangun	397	6,4%
9	Kab. Merangin	469	11,11%
10	Kab. Kerinci	450	75,00%
11	Kota Sungai Penuh		
12	**Provinsi Jambi**	**35.891**	**20,32%**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Dari tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase penganguran yang terserap dan terlayani program pendidikan kecakapan mencapai 20,32%. Kurangnya jumlah lulusan sekolah menengah atas/sederajat dan perguruan tinggi yang bermutu serta rendahnya mutu/kompatibilitas program pendidikan wirausaha/bisnis di sekolah dan universitas juga dianggap sebagai faktor yang menghambat pembangunan Small Medium Enterprise (usaha kecil, menegah, dan mikro) di pedesaan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penghasilan angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan yang miskin adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus dan pelatihan yang sesuai dengan potensi pedesaan sehingga mereka dapat bekerja atau berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.

Langkah awal yang penting untuk memfasilitasi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan sepanjang hayat adalah dengan meningkatkan angka melanjutkan ke pendidikan menengah. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP ke SMA telah mendorong peningkatan kinerja nasional. Dalam jangka panjang, meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah yang berkualitas memungkinkan peningkatan angka

melanjutkan baik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bentuk-bentuk kursus dan pelatihan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah kejuruan dan pendidikan teknik.

Angka partisipasi program pendidikan kecakapan hidup meningkat cukup berarti. Program terdiri dari program „life skills" di kota dan di desa (tingkat kecamatan dan kelurahan) beserta program-program rintisan. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program dengan memberikan „blockgrant" kepada satuan-satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga kursus dan lembaga pelatihan, PKBM dan kelompok masyarakat. Berbagai bidang keterampilan atau keahlian diberikan atau dibelajarkan kepada peserta didik pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan pelatihan keterampilan atau kursus kewirausahaan dan kursus para profesi. SMK-SMK juga memperluas usaha-usaha perolehan dana melalui unit-unit usaha skala kecil dan membuka kelas siang dan sore untuk orang dewasa.

Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, pemerintah menyediakan dukungan anggaran. Pada jalur pendidikan sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan di PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan dalam bentuk kursus, pelatihan, pemagangan kelompok belajar, dan berbagai kegiatan pembelajaran lain yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan luar sekolah yang sekarang menunjukkan peningkatan dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup adalah: lembaga kursus, lembaga pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Balai Pengembangan PAUDNI, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga/organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, industri, sanggar, majelis ta"lim, dan lembaga lain sejenisnya, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Perguruan Tinggi yang peduli pendidikan nonformal dan informal.

D. PENDIDIKAN KEAKSARAAN

1. Perkembangan Capaian Keaksaraan Provinsi

Keaksaraan merupakan pondasi dari pendidikan sepanjang hayat. Konvensi Dakar menekankan pada meningkatnya pencapaian keaksaraan orang dewasa, khususnya perempuan hingga tahun 2015. Capaian keaksaraan nasional telah meningkat cukup signifikan, begitupun capaian program keaksaraan Provinsi Jambi seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 21
Jumlah Penduduk Tuna Aksara Umur 15-59 Tahun
Menurut Jenis Kelamin per kabupaten/kota Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kota Jambi	492	939	1.431
2	Kab. Muaro Jambi	875	2270	3.145
3	Kab. Batang Hari	1.026	4.610	5.636
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.828	4.778	7.606
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.069	1.876	2.945
6	Kab. Tebo	812	2970	3.782
7	Kab. Bungo	2.064	4.397	6.461
8	Kab. Sarolangun	1.566	4.496	6.034
9	Kab. Merangin	698	882	1.580
10	Kab. Kerinci	992	3.345	4.337
11	Kota Sungai Penuh	176	942	1.118
12	**Provinsi Jambi**	**12.598**	**31.505**	**44.075**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 15
Jumlah Penduduk Tuna Aksara Umur 15-59 Tahun
Menurut Jenis Kelamin per kabupaten/kota Tahun 2015

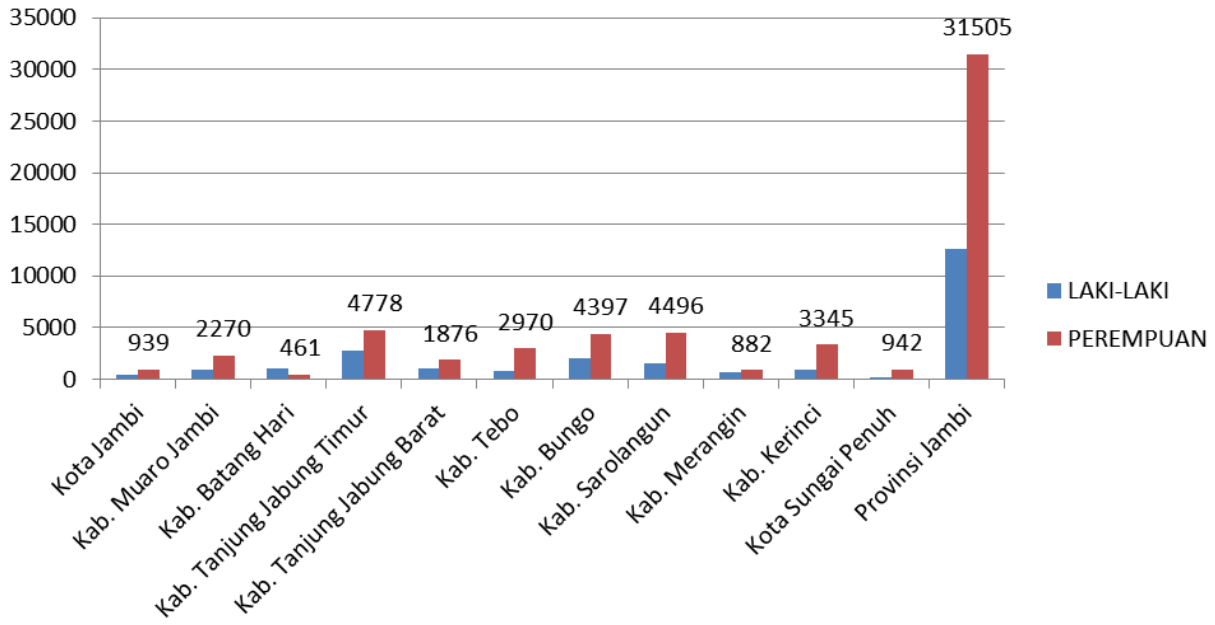

Program pemberantasan buta aksara di Provinsi Jambi yang diselenggarakan pada dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan. Sebagaimana terlihat dari meningkatnya persentase penduduk melek aksara orang dewasa usia 15-59.

Lambatnya laju penurunan angka buta aksara diduga karena tinggal sisa kelompok tersulit (hardrock) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal didaerah terpencil, komunitas-komunitas khusus,dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti inefisiensi pada pendidikan persekolahan dan luar sekolah serta ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pendidikan keaksaraan yang umumnya diberikan dalam kelompok belajar sulit untuk menjangkau penduduk buta aksara di daerah terpencil yang tempat tinggalnya secara umum menyebar. Kelompok tersulit lain adalah masyarakat yang belum memahami manfaat kemampuan keaksaraan sebagai kemampuan dasar untuk

memperoleh nilai tambah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam meningkatkan produktivitas mereka.

Menghadapi tantangan dan masalah yang terkait dengan karakteristik sasaran yang termasuk kelompok sulit telah dilakukan terobosan dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dan Pemberantasan Buta Aksara. Hasil yang diperoleh menunjukkan penurunan jumlah buta aksara yang terjadi cukup signifikan pada tiga tahun terakhir.

Oleh karena itu perlu perencanaan yang sangat matang dan perlu kerja keras dari seluruh elemen baik dari pemerintah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat penyandang buta aksara.

Tabel 22
Disparitas Angka Melek Huruf Laki-Laki Terhadap Perempuan
Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015		
		LK	PR	JML
1	Kota Jambi	178.233	174.112	352.346
2	Kab. Muaro Jambi	143.559	131.339	277.898
3	Kab. Batang Hari	93.158	84.191	177.349
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	77.620	70.561	148.181
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	113.756	101.167	214.923
6	Kab. Tebo	118.714	107.474	226.188
7	Kab. Bungo	118.075	114.155	232.230
8	Kab. Sarolangun	88.937	81.960	170.925
9	Kab. Merangin	97.029	95.025	192.054
10	Kab. Kerinci	83.770	85.919	169.689
11	Kota Sungai Penuh	30.811	31.796	62.607
12	**Provinsi Jambi**	**1.143.662**	**1.077.699**	**2.224.390**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Grafik 16
Disparitas Angka Melek Huruf Laki-Laki Terhadap Perempuan
Tahun 2013 – 2015

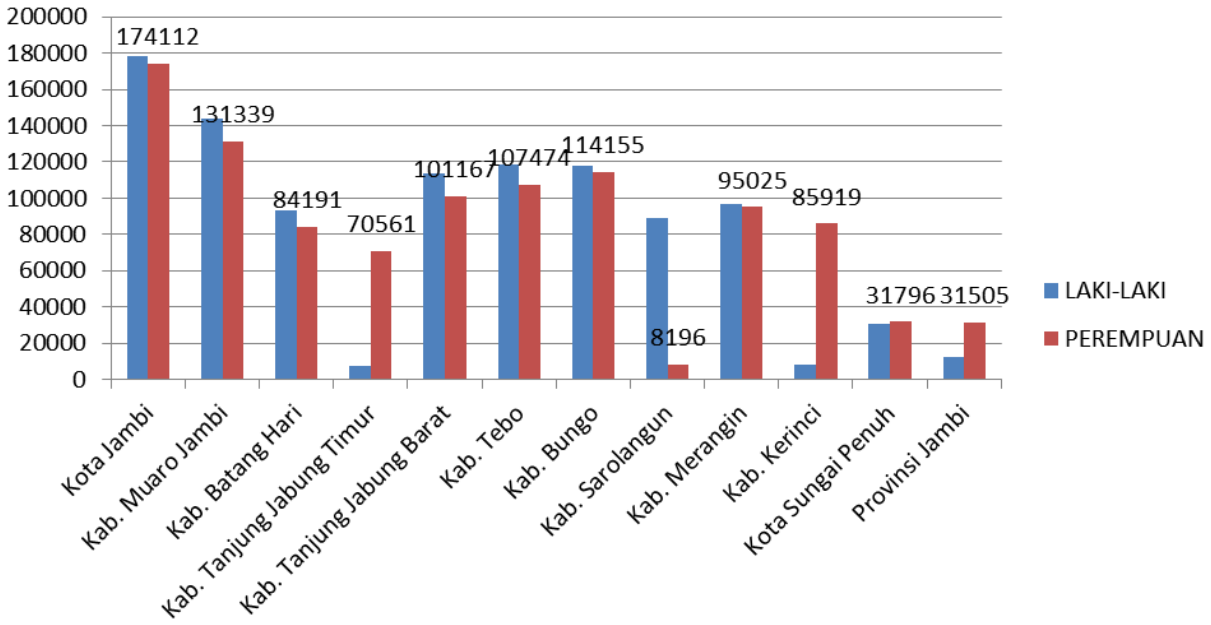

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk tuna aksara masih didominasi oleh perempuan dengan jumlah sebesar 104.753 orang atau 49,33% dari total, sedangkan laki-laki hanya berjumlah sebesar 94.456 orang atau 32,49% dari total.

Kondisi yang beragam tersebut membutuhkan tingkat perhatian dan penetapan prioritas penyediaan program yang berbeda. Sejumlah faktor yang menyebabkan kesenjangan ini, antara lain adalah: (a) adanya keterbatasan akses di masa lalu, (b) tingginya anak tidak bersekolah dan putus sekolah,(c) keterbatasan akses pendidikan alternatif bagi buta aksara dewasa dimasa mereka masih berada di usia sekolah, serta (d) kondisi usia yang rata-rata di atas 55 tahun.

2. Akses dan Partisipasi Program Keaksaraan

Program keaksaraan dilaksanakan dalam beberapa jenis program, antara lain keaksaraan dasar, pendidikan kecakapan hidup untuk wanita, aksara kewirausahaan mandiri, koran anak, koran ibu, keaksaraan berbasis cerita rakyat dan lainnya. Hampir semua program keaksaraan tidak hanya mengajarkan tentang membaca, menulis dan menghitung, tetapi juga diintegrasikan dengan keterampilan agar lebih berguna bagi warga belajar, khususnya orang dewasa.

Secara internal kekuatan yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

a. Komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Inpres dan Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus tentang penuntasan buta aksara;
b. Tertuangnya target dan indikator kinerja keaksaraan dalam Rencana Strategis Kemndiknas selaras dengan tujuan EFA, MDGs, dan capaian HDI;
c. Adanya semangat voluntarisme dan partisipasi masyarakat sebagai pengelola, dan tutor atau pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaaraan;
d. Tersedianya dana bantuan (blockgrant) dalam APBN dan Beberapa APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
e. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemdiknas dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk MoU;
f. Metode dan waktu pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Layanan pendidikan keaksaraan lebih berorientasi pada keterampilan fungsional dan life skills;
g. Adanya sistem evaluasi dan sertifikasi (SUKMA) sehingga evaluasi dan pengendalian program dapat dikendallikan dengan baik;
h. Dukungan anggaran (APBD) yang makin baik sehingga menjangkau jumlah sasaran pendidikan keaksaran yang besar dan bervariasi;
i. Lingkungan internasional/regional terkait dengan pengembangan program pendidikan keaksaraan melalui kerangka LIFE (Literacy Innitiative for Empowerment) yang lebih berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan tersedianya sistem evaluasi bertaraf internasional yaitu LAMP (Literacy Assesment and Monitoring Program) yang bisa diajdikan rujukan.

Semantara itu, kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

a. Masih adanya masyarakat paling miskin, marginal, di perkotaan, pedesaan, daerah tinggal dan terpencil, terisolir, yang berusia di atas 45 tahun dengan

minat belajar yang rendah dan sebagian besar mereka adalah perempuan, masih banyak penyandang buta aksara;

b. Keberhasilan pendidikan keaksaraan yang kurang mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan banyaknya peserta belajar yang cenderung buta aksara kembali;

c. Data sasaran dan informasi pendidikan keaksaran belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga menjadi kesulitan dalam pemetaan dan identifikasi calon peserta;

d. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan sangat beragam dan cenderung lemah, sehingga perlu dukungan memenuhi standar akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan.

e. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah sasaran, sehingga dukungan daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan keaksaraan.

E. PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN (PUG)

Salah satu target indeks pembangunan manusia adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tanpa membedakan peran laki-laki dan perempuan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan adalah mensejajarkan mereka di dalam pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender di dalam pendidikan disadari sebagai program peningkatan kapasitas di bidang pendidikan. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi pelatihan yang diberikan kepada pengambil keputusan, perencana, dan penyusun buku teks pelakaran, serta tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah/lembaga, guru dan tenaga kependidikan nonformal.

Dasar hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender bidang pendidikan di semua program pembangunan juga di semua jenjang

kepemerintahan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan.

1. Disparitas Gender pada Akses dan Partisipasi

Akses terhadap pendidikan berbasis kesetaraan dan keadilan gender telah berkembang secara bertahap semenjak keluarnya kebijakan tentang pengarusutamaan gender tahun 2001. Kesenjangan gender di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah tingkat atas telah menurun secara keseluruhan, baik di pedesaan maupun perkotaan.

a. Partisipasi pada siswa PAUD

Program PAUD mulai dirasakan manfaatnya bagi para orangtua, terutama di daerah. Peningkatan angka partisipasi kasar terus membaik. Jika dilihat dalam perspektif gender, jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan seimbang. Dengan demikian, perbedaan gender (gender parity) dengan indeks perbedaan gender (gender parity index) yaitu 1,00 yang berarti sudah seimbang.

Tabel 23
Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PAUD								
		2013			2014			2015		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kota Jambi	13.763	13.639	27.401	14.892	15.284	30.176	15.190	15.590	30.780
2	Kab. Muaro Jambi	9.077	9.741	18.817	10.419	10.716	21.135	11.561	11.891	23.453
3	Kab. Batang Hari	5.278	7.835	13.113	7.925	8.135	16.060	9.379	9.628	19.007
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.557	6.515	13.072	6.595	6.616	13.211	7.934	7.959	15.893
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.942	6.963	10.905	4.393	7.946	12.339	4.904	8.869	13.773
6	Kab. Tebo	6.927	7.295	14.222	7.406	8.664	16.070	8.258	9.660	17.918
7	Kab. Bungo	6.527	7.642	14.169	7.236	8.307	15.543	7.876	9.041	16.917
8	Kab. Sarolangun	8.531	7.687	16.217	8.637	8.926	17.563	9.299	9.610	18.909
9	Kab. Merangin	10.113	9.849	19.962	10.905	10.918	21.823	11.835	11.849	23.684
10	Kab. Kerinci	6.159	4.911	11.070	6.048	5.944	11.992	6.054	5.949	12.003
11	Kota Sungai Penuh	2.039	2.646	4.685	2.116	2.673	4.789	2.162	2.731	4.893
Provinsi Jambi		**78.912**	**84.722**	**163.634**	**86.572**	**94.129**	**180.701**	**94.452**	**102.777**	**197.230**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

a. Partisipasi Siswa SD/MI/Paket A dalam Perspektif Gender

Partisipasi pendidikan dilihat dari 3 kategori yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam hal partisipasi, paritas gender pada pendidikan dasar sudah cukup baik. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Jumlah sisa SD/MI/Paket A tidak terlalu berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan.

Tabel 24
Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Kota Jambi	36.915	34.628	71.543	40.312	37.813	78.125	41.119	38.569	79.688
2	Kab. Muaro Jambi	23.295	22.135	45.430	23.465	22.296	45.761	23.635	22.457	46.092
3	Kab. Batang Hari	16.859	16.076	32.935	18.295	17.444	35.739	19.731	18.812	38.543
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	13.283	12.876	26.159	13.481	13.068	26.549	13.679	13.260	26.939
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	13.788	13.430	27.218	20.312	19.783	40.095	26.836	26.136	52.972
6	Kab. Tebo	22.121	20.792	42.913	22.476	21.126	43.602	22.832	21.459	44.291
7	Kab. Bungo	23.365	22.085	45.450	24.361	23.025	47.386	25.357	23.965	49.322
8	Kab. Sarolangun	19.113	18.200	37.313	19.216	18.298	37.514	19.320	18.395	37.715
9	Kab. Merangin	24.526	23.195	47.721	25.315	23.942	49.257	25.678	24.284	49.962
10	Kab. Kerinci	13.218	12.125	25.343	13.397	12.289	25.686	14.201	13.026	27.227
11	Kota Sungai Penuh	5.273	4.868	10.141	5.453	5.033	10.486	5.461	5.039	10.500
12	**Provinsi Jambi**	**211.756**	**200.410**	**412.166**	**226.083**	**214.117**	**440.200**	**237.849**	**225.403**	**463.251**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 25
Perkembangan APM SD/MI/Paket A Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	99,70	98,71	99,20	99,32	99,72	99,52	99,52	99,92	99,72
2	Kab. Muaro Jambi	98,54	99,53	99,04	99,00	99,95	99,48	99,20	99,98	99,59
3	Kab. Batang Hari	98,16	99,89	99,02	99,25	99,23	99,24	99,45	99,43	99,44
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	98,64	99,75	99,19	99,23	99,32	99,27	99,43	99,52	99,48
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	99,66	99,85	99,75	99,83	99,97	99,90	99,93	99,98	99,96
6	Kab. Tebo	99,49	97,66	98,57	99,71	99,21	99,46	99,91	99,41	99,66
7	Kab. Bungo	99,32	99,70	99,51	99,74	99,61	99,67	99,94	99,81	99,88
8	Kab. Sarolangun	99,41	98,81	99,11	99,52	99,74	99,63	99,72	99,94	99,83
9	Kab. Merangin	99,86	98,84	99,35	99,26	99,88	99,57	99,46	99,98	99,72
10	Kab. Kerinci	99,44	99,50	99,47	99,84	99,50	99,67	99,94	99,70	99,82
11	Kota Sungai Penuh	99,03	99,22	99,13	99,19	99,20	99,19	99,39	99,40	99,40
12	**Provinsi Jambi**	**99,20**	**99,22**	**99,21**	**99,44**	**99,57**	**99,51**	**99,63**	**99,73**	**99,68**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 26
Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Menurut PG dan IPG
Tahun 2013 - 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	APM Laki-Laki	99,20	99,44	99,63
2	APM Perempuan	99,22	99,51	99,73
3	Jumlah Rata-Rata	99,21	99,48	99,68
4	% Laki – Laki	49,35	49,37	51,36
5	% Perempuan	50,65	50,63	48,64
6	Paritas Gender (PG)	1,30%	1,27%	2,72%

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Selama kurun waktu 2013-2015 persentase siswa SD kelompok usia 7-12 tahun terhadap jumlah anak kelompok usia 7-12 tahun (Angka Partisipasi Murni) anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Sedangkan apabila dilihat dari Paritas Gender (PG) APM SD/MI/Paket A dalam kurun waktu tersebut mengalami kenaikan yaitu dari 1,27% pada tahun 2014 dan menjadi 2,72% pada tahun 2015.

Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan partisipasi anak laki-laki terhadap anak-anak perempuan pada jenjang SD. Bahkan terjadi penurunan proporsi anak laki-laki kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD. Bila dilihat Indeks Paritas Gender (IPG) APM SD dalam kurun waktu yang sama yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu 1,00%.

b. Partisipasi Siswa SMP/MTs dalam Perspektif Gender

Peserta didik untuk jenjang SMP/MTS terus meningkat selama kurun waktu 2013-2015. Hal ini menunjukkan bahwa persentase siswa SMP/MTs terhadap anak kelompok usia 13-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa persentasi anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Ini berarti bahwa tingkat kesempatan belajar secara gender telah terpenuhi.

Tabel 27
Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B
Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	16.475	17.260	33.735	17.340	18.165	35.505	17.687	18.528	36.215
2	Kab. Muaro Jambi	8.873	8.906	17.779	9.258	9.291	18.549	9.643	9.676	19.319
3	Kab. Batang Hari	6.215	6.411	12.626	6.727	6.938	13.665	7.030	7.022	14.052
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	4.866	5.538	10.404	5.069	5.767	10.836	5.272	6.812	12.084
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.208	7.217	14.425	7.840	7.848	15.688	9.068	8.516	17.584
6	Kab. Tebo	8.826	8.494	17.320	9.218	8.871	18.089	9.610	9.129	18.739
7	Kab. Bungo	8.265	8.815	17.080	8.471	9.034	17.505	10.012	10.540	20.552
8	Kab. Sarolangun	7.312	7.098	14.410	7.913	7.680	15.593	8.514	8.262	16.776
9	Kab. Merangin	9.277	9.586	18.863	10.096	10.432	20.528	10.239	10.621	20.860
10	Kab. Kerinci	5.706	5.971	11.677	6.054	6.334	12.388	6.208	6.697	12.905
11	Kota Sungai Penuh	2.354	2.503	4.857	2.798	2.973	5.771	2.832	3.443	6.275
12	**Provinsi Jambi**	**85.377**	**87.799**	**173.176**	**90.784**	**93.333**	**184.117**	**96.115**	**99.246**	**195.361**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 28
Perkembangan APK SMP/MTS/Paket B Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	112,50	115,14	113,82	113,68	120,45	117,06	118,47	122,09	120,28
2	Kab. Muaro Jambi	100,41	99,56	99,99	97,52	104,73	101,13	88,32	85,62	86,97
3	Kab. Batang Hari	97,67	104,13	100,90	100,12	107,70	103,91	98,12	99,01	98,56
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	91,21	106,68	98,95	91,12	109,31	100,21	92,62	122,36	107,49
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	94,43	103,40	98,91	97,66	105,12	101,39	104,22	102,90	103,56
6	Kab. Tebo	98,90	98,91	98,90	100,42	102,88	101,65	103,57	101,00	102,28
7	Kab. Bungo	93,00	109,11	101,06	96,59	107,89	102,24	102,02	107,98	105,00
8	Kab. Sarolangun	107,29	102,06	104,67	105,42	106,33	105,87	102,86	102,33	102,60
9	Kab. Merangin	95,60	103,20	99,40	96,12	104,31	100,21	97,61	103,24	100,42
10	Kab. Kerinci	98,28	102,21	100,24	101,20	105,57	103,39	98,48	111,82	105,15
11	Kota Sungai Penuh	92,86	106,28	99,57	97,83	102,34	100,09	119,04	147,77	133,40
12	**Provinsi Jambi**	**98,38**	**104,61**	**101,49**	**99,79**	**106,97**	**103,38**	**102,30**	**109,65**	**105,97**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 29
Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B Menurut PG dan IPG
Tahun 2013 – 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	APK Laki-Laki	98,38	99,79	102,30
2	APK Perempuan	104,61	106,97	109,65
3	Jumlah Rata-Rata	101,49	103,38	105,97
4	% Laki - Laki	49,30	49,31	49,20
5	% Perempuan	50,70	50,69	50,80
6	Paritas Gender (PG)	-1,40	-1,38	-1,60

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan bahwa persentase siswa SMP/MTs kelompok usia 13-15 tahun terhadap anak kelompok usia 13-15 tahun (APK), untuk anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Hal itu terlihat dari Paritas Gender (PG) dalam kurun waktu tersebut dengan nilai negative serta selalu mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi anak laki-laki lebih tinggi dibanding dengan peningkatan partisipasi anak perempuan pada jenjang SMP/MTs. Bila dilihat Indeks Paritas Gender (IPG) APK SMP/MTs dalam kurun waktu yang sama masih cenderung sama dengan jenjang SD yaitu hanya berkisar 1,07% saja.

2. Disparitas Gender pada Guru

Hampir semua kabupaten/kota telah mencapai paritas gender bidang pendidikan dalam hal akses dan partisipasi. Tetapi mengurangi disparitas gender untuk guru masih menjadi kendala bagi beberapa kabupaten kota.

Tabel 30
Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN 2014
1	GURU TK	11.500
	LAKI - LAKI	522
	PEREMPUAN	10.978
	% LAKI - LAKI	4,54%
	% PEREMPUAN	95,46%
	PARITAS GENDER	90,92%
	INDEKS PARITAS GENDER	21,03
2	GURU SD	28.197
	LAKI - LAKI	6.533
	PEREMPUAN	21.664
	% LAKI - LAKI	23,17%
	% PEREMPUAN	76,83%
	PARITAS GENDER	53,66%
	INDEKS PARITAS GENDER	3,32
3	GURU SMP	11.593
	LAKI - LAKI	4.687
	PEREMPUAN	6.906
	% LAKI - LAKI	40,43%
	% PEREMPUAN	59,57%
	PARITAS GENDER	19,14%
	INDEKS PARITAS GENDER	1,47
4	GURU SMA	2.138
	LAKI - LAKI	612
	PEREMPUAN	1.526
	% LAKI - LAKI	28,62%
	% PEREMPUAN	71,38%
	PARITAS GENDER	42,75%
	INDEKS PARITAS GENDER	2,49
5	GURU SMK	1.587
	LAKI - LAKI	561
	PEREMPUAN	1.026
	% LAKI - LAKI	35,35%
	% PEREMPUAN	64,65%
	PARITAS GENDER	29,30%
	INDEKS PARITAS GENDER	1,83

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Keseluruhan perkembangan di dalam indikator pemerataan dan keadilan gender pada semua tingkat sistem perlu dilihat variasi pelaksanan dan capaiannya. Khususnya terkait dengan variasi capaian yang terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Dalam beberapa kasus, perempuan masih menempatkan peran strategis yang dibutuhkan untuk menjamin pemerataan gender, dan terkait dengan adat-istiadat dan budaya lokal, menempatkan laki-laki agar dapat lebih berperan dalam rangka pemerataan dan keadilan gender dalam penyelenggaraandan pelaksanaan program pendidikan.

F. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dengan telah diterbitkan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah diberbitkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat 8 standar pendidikan yang harus disusun dan ditetapkan untuk diimplementasikan pada setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal. Selanjutnya, dalam rangka mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan pada setiap satuan, maka dibentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yaitu BAN Pendidikan Tinggi (BAN PT), BAN Sekolah/Madrasah (BANS/M), dan BAN Pendidikan Nonformal (BAN PNF).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, salah satu komponen terpenting adalah guru. Untuk itu, dikeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peran dan kedudukan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya, rasio guru dan siswa diIndonesia sudah ideal yaitu rata-rata untuk setiap 15-19 orang siswa di lembaga pendidikan formal-persekolahan dapat ditangani oleh seorang guru. Sementara itu, untuk pendidikan nonformal (paket A, B, Pemberantasan Buta Aksara), satu orang guru/tutor rata-rata melayani 12-17 orang.

Sementara itu, di Provinsi Jambi jumlah guru yang memiliki kewenangan mengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat PAUD yang baru mencapai 0,26% dan SD/MI yang baru mencapai 27%. Sedangkan, untuk SMP/MTs mencapai 43% dan SMA/MA/SMK mencapai 67%. Upaya peningkatan kualifikasi juga disinergikan dengan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi guru.

1. Mutu Guru

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan sangat tergantung dari guru yang berkualitas. Ketersediaan jumlah guru yang memadai pada semua jenjang pendidikan, kualifikasi mereka, serta pelatihan pra dan dalam training (pra and in-service training) memastikan kualitas pembelajaran siswa di dalam kelas.

a. Rasio siswa-guru

Hasil penelitian menyarankan bahwa siswa dapat menyelesaikan pembelajaran yang lebih efektif di dalam kelas yang lebih kecil, hal tersebut akan berbanding terbalik ketika jumlah siswa dalam satu kelas meningkat dan melebihi yang seharusnya. Untuk itulah sangat disarankan bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan rasio siswa guru.

Grafik 17
Perkembangan Rasio Siswa Guru Provinsi
Tahun 2013 – 2015

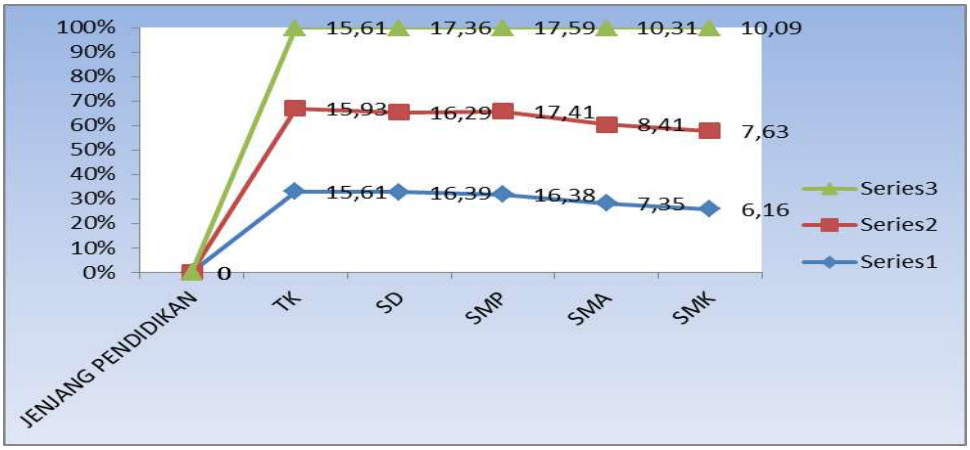

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 31
Perkembangan Rasio Siswa Guru Per Kabupaten/Kota
Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	TK	1 : 16	1 : 16	1 : 16
2	SD	1 : 16	1 : 17	1 : 14
3	SMP	1 : 17	1 : 18	1 : 11
4	SMA	1 : 8	1 : 10	1 : 12
5	SMK	1 : 8	1 : 10	1 : 10

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

b. Guru Terlatih dan Layak Mengajar

Agar proses belajar mengajar lebih efektif, sebaiknya guru mengikuti pelatihan profesi guru dengan jenjang yang telah ditentukan.

Tabel 32
Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar
Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	TK	13,77%	16,11%	18,46%
2	SD	31,31%	33,86%	36,43%
3	SMP	55,03%	57,77%	60,54%
4	SMA	69,23%	72,68%	76,17%
5	SMK	52,17%	53,66%	55,18%
6	**RATA-RATA**	**44,30%**	**46,82%**	**49,36%**

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Tabel 33
Perkembangan Persentase Guru SD, SMP dan SM Menurut Ijazah Tertinggi
Tahun 2013 – 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	**GURU SD**			
	- DI/DII	26,67%	21,88%	
	- DIII	6,62%	4,55%	
	- S1	55,30%	68,47%	
	- S2	0,52%	0,54%	
	- S3	0,00%	0,00%	
2	**GURU SMP**			
	- DI/DII	9,78%	8,90%	
	- DIII	8,51%	7,16%	
	- S1	75,83%	76,59%	
	- S2	1,41%	1,80%	
	- S3	0,00%	0,00%	
3	**GURU SM**			
	- DI/DII	1,58%	0,44%	
	- DIII	2,12%	1,87%	
	- S1	85,74%	88,46%	
	- S2	2,39%	3,53%	
	- S3	0,02%	0,02%	

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Latar belakang pendidikan dan penguasaan mata pelajaran para guru perlu ditingkatkan. Misalnya pada tahun 2014 jumlah guru yang layak mengajar pada jenjang SD baru mencapai 33,86% dari keseluruhan. Sedangkan untuk jenjang SMP mencapai 57,77%. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, jumlah SD berkualifikasi ≥ S1 hanya 69,01%.

2. Hasil Pembelajaran Peserta Didik (Sekolah Dasar s.d. Sekolah Menengah)

Beberapa tahun terakhir, baik pemerintah pusat maupun daerah telah menaruh perhatian untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Penilaian pembelajaran memungkingkan pengukuran perkembangan dan peningkatan area potensial pembeljaran siswa di sekolah. Penilaian pembelajaran juga membantu merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan untuk menambah kualitas keseluruhan pendidikan.

Tabel 34
Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP per kabupaten/kota
Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Kota Jambi	28,94	31,04	71,80
2	Kab. Muaro Jambi	28,72	30,39	59,30
3	Kab. Batang Hari	27,23	28,94	53,10
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	28,86	30,88	51,80
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	25,57	28,61	56,40
6	Kab. Tebo	25,07	27,90	53,30
7	Kab. Bungo	27,50	29,91	46,50
8	Kab. Sarolangun	26,48	27,86	44,10
9	Kab. Merangin	26,15	26,17	49,60
10	Kab. Kerinci	32,18	32,95	41,60
11	Kota Sungai Penuh	29,37	30,72	45,50
12	**Provinsi Jambi**	**27,82**	**29,58**	**52,09**

Sumber : Tim Pengelola UN Disdik Provinsi Jambi

Grafik 18
Perkembangan Hasil Nilai UN Tingkat SMP Provinsi Jambi
Tahun 2013 – 2015

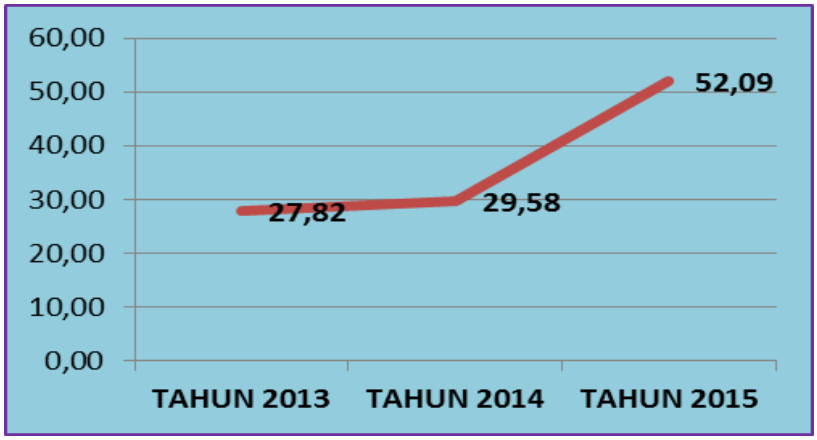

Pada tingkat SMP, hasil ujian nasional antara tahun 2013 hingga 2015 mengalami Peningkatan yang signifikan. Tahun 2013 nilai UN SMP rata-rata sebesar 27,82, Tahun 2014 sebesar 29,58, dan pada tahun 2014 sebesar 52,09.

Indikator lain peningkatan standar dan mutu pendidikan adalah kenaikan angka kelulusan Ujian Nasional selama tahun 2013-2015. Walaupun standar minimum kelulusan selalu dinaikan pada setiap tahunnya, tetapi jumlah siswa yang lulus Ujian Nasional selalu meningkat.

Tabel 35
Perkembangan Persentase Lulusan SD, SMP dan SM
Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	SD	99,64%	99,87%	98,76%
2	SMP	99,32%	99,41%	97,25%
3	SMA	98,32%	99,32%	98,21%
4	SMK	99,27%	99,41%	83,86%
5	**Provinsi Jambi**	**99,14%**	**99,50%**	**94,52%**

Sumber : Tim Pengelola UN Disdik se-Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, persentase lulusan SD meningkat dari 99,64% pada tahun 2012 menjadi 99,87% pada tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang SMP pada tahun 2012, persentase lulusan sebesar 99,32% hingga tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 99,41%.

Kemajuan yang berarti terkait dengan peningkatan mutu pendidikan adalah penetapan standar dan akreditasi sekolah. Standar minimum kinerja sekolah dan input pendidikan yang relevan telah ditetapkan pada 2004. Kapasitas akreditasi sekolah diperluas dengan berdirinya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANS/M) tingkat Nasional dan BAP Provinsi. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Provinsi Jambi, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah sekolah yang terakreditasi yaitu sebagaimana pada tabel terlampir.

Tabel 36
Perkembangan Jumlah SD, SMP, dan SM yang Terakreditasi
Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	SD	2.023	2.190	1.195
2	SMP	445	457	381
3	SMA	181	206	158
4	SMK	108	117	155
5	**Provinsi Jambi**	**2.757**	**2.970**	**1.889**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan bahwa sistem dan manajemen sekolah berbasis kinerja merupakan hal yang penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Tahapan yang dilakukan yaitu: (a) membuat peraturan dan undang-udang yang memuat tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dan komite sekolah; (b) menyusun panduan pelaksanaan manajemen berbasis hasil (result based management) di sekolah-sekolah; (c) mengadakan pelatihan kepala sekolah, tata kelola-manajemen komite sekolah di seluruh Indonesia.

BAB III
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PUS

Bab ini memberikan informasi tentang penilaian hasil pelaksanaan program PUS periode 2011 – 2015, serta menganalisa faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan capaian pelaksanaan PUS.

A. Penilaian terhadap Strategi Pelaksanaan PUS

Berdasarkan bab II, sangat jelas bahwa provinsi telah membuat perkembangan yang cukup bagus dalam pelaksanaan program PUS meliputi program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Berikut beberapa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan enam program PUS, antara lain:

1. *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

   Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan askses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain:

   a. Program satu desa satu lembaga PAUD. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses ke PAUD bagi semua masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD.
   b. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk membantu lembaga PAUD meningkatkan bahan ajar, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan prasarana lembaga.
   c. Membangun kemitraan dengan organisasi mitra PAUD. Salah satu upaya untuk mempercepat capaian program satu desa satu PAUD adalah membangun kerjasama dengan organisasi mitra yang memiliki cabang sampai ke daerah terpencil dan daerah 3 T. Organisasi mitra tersebut antara lain: Forum PAUD, Konsorsium PAUD, Organisasi Wanita, Perguruan

Tinggi, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI, IGRA, BPTKI dan lembaga mitra PAUD lainnya;

d. Pembentukan Bunda PAUD provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan program PAUD.
e. Memanfaatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung perluasan akses layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
f. Mengembangkan program PAUD bagi daerah yang belum terjangkau layanan PAUD, melalui perintisan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan pelayanan PAUD terintegrasi dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita dan pengembangan model PAUD TK-Kecil, TK Alternatif, serta bentuk lain yang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
g. Mengembangkan standar, acuan dan kurikulum penyelenggaraan program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
h. Mendata dan membuat peta program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencakup data lembaga dan sasaran layanan PAUD;

2. *Pendidikan Dasar*
   a. Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun untuk usia 7-15 tahun, saat ini sedang menuju wajib belajar dua belas tahun 7-18 tahun (pendidikan menengah universal);
   b. Penyaluran program BOS (Biaya operasional sekolah) sebagai upaya penghapusan biaya pokok pendidikan
   c. Pemberian bantuan bantuan pengadaan buku teks sehingga siswa memiliki materi instruksional
   d. Diseminasi hasil evaluasi prestasi belajar siswa SD dan SMP melalui pembentukan komite sekolah dan sistem ujian nasional;
   e. Melaksanakan gerakan penuntasan program pendidikan dasar dengan melibatkan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orangtua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan,

sehingga pelaksanaan penuntasan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (*community-based education*);

f. Mengupayakan secara efektif target masyarakat yang belum terjangkau (miskin, terpencil dan terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, dalam rangka meningkatkan persamaan hak untuk akses pendidikan dasar
g. Penyediaan pendidik yang berkompeten pada level pendidikan dasar yang merata seluruh kabupaten dan kota, yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B;

3. *Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)*
   a. Optimalisasi peran lembaga kursus dan pelatihan;
   b. Pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan masyarakat;
   c. Program Standardisasi Kompetensi melalui Pendekatan 4 in 1, antara lain: penilaian, kursus dan pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.
   d. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan peserta didik untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan siap untuk berusaha mandiri
   e. Mengembangkan sistem pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang berbasis pada standar kompetensi.

4. *Pendidikan Keaksaraan*

   Strategi pelaksanaan pendidikan keaksaraan fokus pada ketersediaan dan perluasan akses pendidikan keaksaraan yang berkelanjutan dan adil untuk semua. Hal ini dilakukan melalui strategi berikut :
   a. Membangun kerjasama dengan organisasi mitra Pendidikan Masyarakat. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan khususnya bagi perempuan, tidak akan sepenuhnya berhasil tanpa dukungan dari lembaga mitra, antara lain: Muslimat NU, Aisyiyah, KOWANI, PKK dan lainnya.

b. Pada tahun 2014, pemerintah Provinsi Jambi telah memprioritaskan penuntasan buta aksara di kabupaten/kota yang jumlah buta aksaranya masih tinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
c. Menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar diintegrasikan dengan kecakapan hidup;

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Di dalam laporan pelaksanaan program PUS, sangat penting untuk dapat mengetahui faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat capaian program PUS. Terkait dengan laporan ini, faktor pendukung adalah hal yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan pelaksanaan dan capaian PUS. Sedangkan faktor penghambat adalah hal yang dapat menahan pembangunan dan perkembangan pendidikan, khususnya pelaksanaan program PUS.

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan progam PUS periode 2000 – 2015 antara lain:

a. Terintegrasinya program PUS dalam rencana aksi nasional dan daerah, termasuk dalam rencana strategis nasional dan daerah;
b. Kebijakan dan payung hukum pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun dan dua belas tahun yang wajib dan bebas biaya;
c. Pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota telah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik untuk pendidikan;
d. Adanya semangat yang tinggi dari para keluarga baik di perkotaan maupun pedesaan untuk menyekolahkan anak-anaknya;
e. Adanya bantuan dana (blockgrant) kepada sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dasar nonformal (Paket A/Paket B) untuk mendukung program pendidikan dasar;
f. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain, yang sepenuhnya memberikan dukungan bagi keberhasilan program pendidikan dasar.

g. Tersedianya dana bantuan (blockgrant) dalam APBN dan Beberapa APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan program pendidikan nonformal lainnya;
h. Lingkungan internasional/regional terkait dengan pengembangan program pendidikan keaksaraan melalui kerangka LIFE (*Literacy Innitiative for Empowerment*) yang lebih berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan tersedianya sistem evaluasi bertaraf internasional yaitu LAMP (*Literacy Assessment and Monitoring Program*) yang bisa diajdikan rujukan.

2. *Faktor Penghambat*

Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai target PUS yang telah ditetukan, salah satunya adalah dengan membangun kemitraan yang kuat di berbagai sektor, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan dan capaian program PUS, antara lain:

a. Faktor demografi, kepadatan penduduk, geografi (jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh), dan transportasi menyebabkan dampak yang cukup signifikan di beberapa daerah, khususnya daerah 3 T (terpencil, terluar dan terdepan).
b. Kemiskinan. Saat ini kemiskinan merupakan salah satu hambatan utama di dalam pelaksanaan program PUS. Pada tahun 2014, persentase kemiskinan di Provinsi Jambi adalah sebesar 8,39% (september). Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dasar dan memiliki resiko putus sekolah serta putus lanjut lebih besar karena memilih untuk bekerja (menjadi pekerja anak).
c. Tata kelola pemerintahan yang kurang baik dan lemahnya koordinasi.
d. Hambatan budaya dan agama. Kesenjangan etnis dan jenis kelamin terus menjadi kendala dalam mengakses pendidikan, terutama bagi mereka yang termajinalkan (perempuan di pedesaan dan mereka yang cacat).
e. Kurang meratanya guru yang berkualitas, terlatih dan bersertifikasi, khususnya di daerah 3 T.
f. Kurangnya kesesuaian guru terhadap mata pelajaran yang diajarkan serta kemampuan guru secara umum masih jauh dari yang diharapkan.

g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai, karena masih banyak gedung sekolah yang rusak dan sarana penunjang lainnya.
h. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pengelolaan pendidikan nonformal dan informal cenderung kurang efektif sehingga pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun sering berjalan kurang optimal
i. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah sasaran, sehingga dukungan daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan keaksaraan.
j. Dalam implementasinya, masih banyak lembaga kursus yang kurang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga masih menyelenggarakan program-program keterampilan yang tidak lagi relevan dan sejalan dengan tuntutan DUDI saat ini.
k. Ketidakamanan karena bencana alam, perubahan iklim, dan konflik, khususnya bagi mereka yang berada di daerah perbatasan dan daerah konflik.

C. Kisah Sukses (*Best Practice*) Pelaksanaan Program PUS

1. Meningkatnya anggaran pendidikan khususnya dari pemerintah daerah (baik tingkat 1 dan 2).
2. Dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarkat terkait dengan pentingnya program PUS, khususnya pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya APK PAUD Provinsi.
3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan desa yang memiliki minimal 1 PAUD;
4. Meningkatnya Keterlibatan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan pendidikan di luar pemerintah baik itu lembaga mitra, masyarakat, serta pihak swasta dalam hal perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan pendidikan. Hal ini sangat penting untuk mencapai target yang telah ditentukan. Menyadari kontribusi peningkatan pendidikan, pemerintah

akan mendapatkan dengan mendorong, mendukung, mengklarifikasi dan mengatur keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan pendidikan;

5. Melaksanakan program pemberantasan buta huruf bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui perguruan tinggi dan pemberian bantuan operasional pendidikan dan media teknologi informasi.

BAB IV

TANTANGAN WILAYAH DAN PRIORITAS PENDIDIKAN PASCA 2014

Orientasi pendidikan pasca-2014 perlu melampaui tujuan PUS sebelumnya dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada semua tingkat pendidikan, fokus kepada pembelajaran yang efektif melalui pendekatan yang inkulisf. Selain itu, akses, pemerataan, mutu, relevansi dan belajar sepanjang hayat harus menjadi konsep utama untuk mendukung pendidikan pasca-2014. Konsep-konsep utama tersebut meliputi: (a) pembelajaran sepanjang hayat, (b) akses dan partisipasi, (c) keadilan, (d) pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, (e) Tata kelola dan pembiayaan.

A. Rencana Pembangunan Pendidikan di Provinsi

Perkembangan teknologi, pergeseran demografi, perubahan ekonomi, sosial dan politik yang sangat cepat, serta degradasi lingkungan, sangat berdampak dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam bidang ekonomi misalnya, perubahan kebijakan ekonomi dan pasar kerja yang cepat membuat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan. Ini berarti bahwa sistem pendidikan harus mampu merespon kebutuhan peserta didik yang semakin beragam, multi budaya dan multi bahasa.

Rencana Pembangunan Pendidikan di Provinsi Jambi pada tahun 2015 masih sama dengan tahun sebelumnya, antara lain :

1. Menambah fasilitas pendidikan yang ada di sekolah-sekolah terutama SMA dan SMK yang tersebar dalam kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
2. Melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan sehingga para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.
3. Melatih guru-guru mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK dalam hal memberikan pembelajaran di sekolah.
4. Memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang sedang bersekolah sesuai peruntukannya.

B. Permasalahan dan Tantangan

Dalam agenda pembangunan pendidikan pasca 2014, masih ada beberapa permasalahan dan tantangan yang muncul, antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam hal pendaftaran, kemajuan dan hasil belajar didasarkan atas jenis kelamin, geografis, etnik, Bahasa, dan mereka yang berkebutuhan khusus;
2. Masih kurangnya kualitas pendidikan yang efektif dan efisien untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran bagi semua siswa;
3. Kurangnya komitmen jangka panjang dan tindakan yang berkelanjutan serta sumber daya pendidikan yang berkualitas;
4. Minimnya transparansi pengelolaan pendidikan, akuntabilitas yang lemah dan korupsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program PAUD di Provinsi Jambi antara tahun 2011-2015 telah berhasil dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan capaian APK PAUD sebesar 51,10% pada tahun 2011 menjadi 71,61% pada tahun 2015.
2. Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2015, APM SD/MI telah mencapai 99,68%, dan APK SD/MI telah mencapai 116,42%.
3. Program pendidikan keaksaraan telah mencapai target lebih dari 50% penduduk Provinsi Jambi telah melek huruf. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf sebesar 95,97% pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 97,77% pada tahun 2014.
4. Program pendidikan kecakapan hidup (PKH) provinsi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu (1) sebesar 75,56% anak putus sekolah dan yang telah lulus SMA/SMK/MA tidak melanjutkan pendidikannya telah mendapat layanan pendidikan PKH bersertifikasi disertai penempatan kerja; (2) sebesar 29,78 % lulusan PKH bersertifikat kompetensi.
5. Persamaan gender telah mencapai keseimbangan antara anak laki-laki dan anak perempuan di setiap tingkatan pendidikan, kecuali di tingkat SMA/SMK/MA. Pada tahun 2012 persentase perempuan buta aksara sebesar 1,93%, dan pada tahun 2013 persentase perempuan buta aksara sebesar 1,73 %.
6. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jambi telah melaksanakan program kualifikasi dan sertifikasi guru. Demikian juga dengan prestasi belajar siswa dari setiap jenis dan jenjang pendidikan.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

- Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
- Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua di segala usia
- Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua
- Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan
- Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua
- Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua
- Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang
- Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara
- Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut
- Melindungi, memperbaharui dan mendukung penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati

- Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan
- Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Luas Wilayah Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS DARATAN
1	Kota Jambi	205.43 Km^2 (0,41%)
2	Kab. Muaro Jambi	5.326 Km^2 (10,62%)
3	Kab. Batang Hari	5.804 Km^2 (11,57%)
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.445 Km^2 (10,86%)
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	4.649,85 Km^2 (9,27%)
6	Kab. Tebo	6.461 Km^2 (12,88%)
7	Kab. Bungo	4.659 Km^2 (9,29%)
8	Kab. Sarolangun	6.184 Km^2 (11,57%)
9	Kab. Merangin	7.679 Km^2 (15,31%)
10	Kab. Kerinci	3.355,27 Km^2 (6,69%)
11	Kota Sungai Penuh	391.5 Km^2 (0,78%)

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jambi

Lampiran 2. Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2016 Menurut Kab./Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS DARATAN
1	Kota Jambi	2.840 Orang / Km^2
2	Kab. Muaro Jambi	77 Orang / Km^2
3	Kab. Batang Hari	45 Orang / Km^2
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	39 Orang / Km^2
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	68 Orang / Km^2
6	Kab. Tebo	52 Orang / Km^2
7	Kab. Bungo	75 Orang / Km^2
8	Kab. Sarolangun	45 Orang / Km^2
9	Kab. Merangin	48 Orang / Km^2
10	Kab. Kerinci	70 Orang / Km^2
11	Kota Sungai Penuh	224 Orang / Km^2

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Lampiran 3. Perkembangan APK PAUD Umur 3-6 Tahun Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	APK PAUD				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	36.08%	37.83%	73.33%	73.83%	74.92%
2	Kab. Muaro Jambi	41.66%	43.67%	67.84%	69.34%	69.82%
3	Kab. Batang Hari	42.14%	44.20%	68.41%	68.91%	69.91%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.26%	74.72%	79.66%	85.98%	86.59%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	29.62%	31.08%	48.15%	48.98%	49.35%
6	Kab. Tebo	37.72%	39.54%	60.96%	61.46%	62.43%
7	Kab. Bungo	34.38%	36.05%	56.31%	56.98%	57.93%
8	Kab. Sarolangun	70.78%	74.18%	77.82%	78.06%	79.91%
9	Kab. Merangin	46.73%	48.98%	75.70%	75.84%	76.13%
10	Kab. Kerinci	62.14%	65.14%	78.89%	79.28%	80.40%
11	Kota Sungai Penuh	89.59%	93.89%	74.79%	77.38%	80.36%
Provinsi Jambi		**51.10%**	**53.57%**	**69.26%**	**70.61%**	**71.61%**

Sumber : Disdik. Kemenag. dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 4. Perkembangan jumlah lembaga PAUD berdasarkan Satuan PAUD Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	413	448	372	448	470
2	Kab. Muaro Jambi	268	204	204	322	440
3	Kab. Batang Hari	208	245	238	245	314
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	286	266	266	299	297
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	170	164	164	233	278
6	Kab. Tebo	248	234	234	288	355
7	Kab. Bungo	178	242	232	242	244
8	Kab. Sarolangun	269	338	338	513	456
9	Kab. Merangin	174	342	322	342	387
10	Kab. Kerinci	232	304	304	337	340
11	Kota Sungai Penuh	116	106	106	139	118
Provinsi Jambi		**232.91**	**263.00**	**252.73**	**309.82**	**336.27**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 5. Perkembangan Jumlah Guru PAUD Berdasarkan Kualifikasi Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	KUALIFIKSI PENDIDIKAN		TOTAL
		≤ S1	> S1	
1	Kota Jambi	556	672	1.228
2	Kab. Muaro Jambi			
3	Kab. Batang Hari	755	506	1.261
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	245	206	451
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.072	7	1.079
6	Kab. Tebo	834	358	1.192
7	Kab. Bungo	414	103	517
8	Kab. Sarolangun	2.165	6	2.171
9	Kab. Merangin	1.542	14	1.556
10	Kab. Kerinci	925	390	1.315
11	Kota Sungai Penuh	341	174	515
Provinsi Jambi		**8.293**	**1.764**	**10.057**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 6. Perkembangan APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	85.92	89.99	99.2	99.52	99.73
2	Kab. Muaro Jambi	85.92	89.99	99.04	99.48	99.53
3	Kab. Batang Hari	85.94	90.01	99.02	99.24	99.59
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	85.95	90.02	99.19	99.27	99.57
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	85.95	90.02	99.75	99.9	99.96
6	Kab. Tebo	85.94	90.01	98.57	99.46	99.59
7	Kab. Bungo	85.93	89.99	99.51	99.67	99.69
8	Kab. Sarolangun	85.95	90.02	99.11	99.63	99.76
9	Kab. Merangin	85.97	90.04	99.35	99.57	99.59
10	Kab. Kerinci	85.98	90.05	99.47	99.67	99.72
11	Kota Sungai Penuh	85.96	90.03	99.13	99.19	99.26
12	**Provinsi Jambi**	**85.95**	**90.02**	**99.21**	**99.51**	**99.64**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 7. Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	245.9	282.62	113.82	117.06	118.85
2	Kab. Muaro Jambi	72.82	81.89	99.99	101.13	102.02
3	Kab. Batang Hari	66.84	74.77	100.9	103.91	104.3
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	57.65	65.06	98.95	100.21	101.1
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	50.45	56.1	98.91	101.39	102.97
6	Kab. Tebo	146.03	167.61	98.9	101.65	102.27
7	Kab. Bungo	91.75	102.89	101.06	102.24	104.62
8	Kab. Sarolangun	56.05	63.34	104.67	105.87	108.65
9	Kab. Merangin	50.38	56.3	99.4	100.21	101.09
10	Kab. Kerinci	38.79	43.75	100.24	103.39	103.98
11	Kota Sungai Penuh	82.61	94.95	103.36	122.79	103.41
12	**Provinsi Jambi**	**87.21**	**99.03**	**101.84**	**105.44**	**104.84**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 8. Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	364	391	372	448	470
2	Kab. Muaro Jambi	400	345	204	322	440
3	Kab. Batang Hari	308	324	238	245	314
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	316	263	266	299	297
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	349	270	164	233	278
6	Kab. Tebo	382	352	234	288	355
7	Kab. Bungo	441	315	232	242	244
8	Kab. Sarolangun	361	285	338	513	456
9	Kab. Merangin	442	436	322	342	387
10	Kab. Kerinci	335	293	304	337	340
11	Kota Sungai Penuh	100	83	106	139	118
12	**Provinsi Jambi**	**345.27**	**305.18**	**252.73**	**309.82**	**336.27**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 9. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	9900	71510	105278	11363	121406
2	Kab. Muaro Jambi	5388	65339	63209	6431	67173
3	Kab. Batang Hari	4264	33768	45561	49404	52761
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	3590	40535	36563	37385	38824
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	4743	13979	41643	55783	5855
6	Kab. Tebo	5626	60500	60233	61691	64133
7	Kab. Bungo	5504	60822	6253	64891	67728
8	Kab. Sarolangun	4559	48084	51723	53107	54582
9	Kab. Merangin	13541	58113	66584	69785	71785
10	Kab. Kerinci	3861	15692	3702	38074	37036
11	Kota Sungai Penuh	1448	14635	14998	16257	16867
12	**Provinsi Jambi**	**5674.9**	**43907.0**	**45067.9**	**42197.4**	**54377.3**

Lampiran 10. Jumlah Siswa Paket A dan Paket B per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2011		2012		2013		2014		2015	
		Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B	Paket A	Paket B
1	Kota Jambi	121	600	141	747	141	747	141	747	56	404
2	Kab. Muaro Jambi	201	963	141	129	151	129	151	129	92	78
3	Kab. Batang Hari	200	350	239	1046	239	1046	239	1046	89	262
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	100	980	66	1273	66	1273	66	1273	156	520
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	260	1120	265	1339	265	1339	265	1339	62	1683
6	Kab. Tebo	226	1000	266	1284	266	1284	266	1284	0	462
7	Kab. Bungo	183	860	194	1066	194	1066	194	1066	112	362
8	Kab. Sarolangun	200	1035	231	1286	231	1286	231	1286	49	344
9	Kab. Merangin	344	1240	327	1485	327	1485	327	1485	259	103
10	Kab. Kerinci	220	1065	180	1113	180	1113	180	1113	764	634
11	Kota Sungai Penuh	145	710	102	458	102	458	102	458	105	540
12	**Provinsi Jambi**	**2200**	**9923**	**2152**	**11226**	**2162**	**11226**	**2162**	**11226**	**1744**	**5392**

Sumber : Disdik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 11. Perkembangan Jumlah Guru SD dan Sederajat Berdasarkan Kualifikasi per kabupaten/kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	3019	2652	2904	2956	2916
2	Kab. Muaro Jambi	1684	1735	1735	1735	1699
3	Kab. Batang Hari	615	1011	1019	1098	1273
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	896	1098	1262	1357	1528
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3948	3972	3972	4357	4357
6	Kab. Tebo	1135	581	874	682	1188
7	Kab. Bungo	1320	1656	1660	1248	1016
8	Kab. Sarolangun	945	806	806	875	2157
9	Kab. Merangin	3238	1915	1965	2261	2379
10	Kab. Kerinci	159	159	159	159	1948
11	Kota Sungai Penuh	632	381	686	553	553
12	**Provinsi Jambi**	**17591**	**15966**	**17042**	**17281**	**21014**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 12. Persentase Siswa SMP Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	20.05%	25.54%	30.00%	39.15%	40.02%
2	Kab. Muaro Jambi	13.42%	15.68%	16.52%	27.20%	38.45%
3	Kab. Batang Hari	11.30%	12.25%	13.33%	20.82%	85.45%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.40%	9.60%	10.42%	24.99%	26.99%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	9.60%	10.58%	11.87%	26.97%	24.32%
6	Kab. Tebo	29.05%	30.65%	31.00%	35.00%	38.65%
7	Kab. Bungo	33.20%	34.15%	35.00%	21.00%	23.88%
8	Kab. Sarolangun	30.02%	31.25%	32.02%	31.25%	37.85%
9	Kab. Merangin	31.00%	32.20%	34.00%	42.00%	54.00%
10	Kab. Kerinci	35.85%	38.25%	39.00%	39.00%	39.25%
11	Kota Sungai Penuh	32.25%	33.68%	34.00%	33.00%	34.15%
12	**Provinsi Jambi**	**23.10%**	**24.89%**	**26.11%**	**30.94%**	**40.27%**

Lampiran 13. Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Jenis Kelamin Per kabupaten/kota Tahun 2015.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015		
		L	P	JML
1	Kota Jambi	8.987	4.550	13.537
2	Kab. Muaro Jambi	2.145	2.858	5.003
3	Kab. Batang Hari	1.150	1.059	2.209
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	859	502	1.361
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.531	1.160	2.691
6	Kab. Tebo	859	785	1.644
7	Kab. Bungo	2.086	1.407	3.493
8	Kab. Sarolangun	2.285	2.051	4.336
9	Kab. Merangin	1.999	1.461	3.460
10	Kab. Kerinci	740	967	1.707
11	Kota Sungai Penuh	1.157	658	1.815
12	**Provinsi Jambi**	**23.798**	**17.458**	**41.256**

Sumber : Disdik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 14. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	Jenjang Pendidikan			
		<=SD	SMP	SMA	DI/II/III/ Akademi/ Universitas
1	Kota Jambi	42.482	38.577	72.220	62.805
2	Kab. Muaro Jambi	71.194	40.941	48.865	14.959
3	Kab. Batang Hari	92.078	41.168	34.568	9.204
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	69.074	17.845	15.070	4.793
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	76.977	28.004	42.717	-
6	Kab. Tebo	87.122	37.567	32.411	12.092
7	Kab. Bungo	42.710	30.580	42.320	1.441
8	Kab. Sarolangun	67.758	24.476	31.347	13.207
9	Kab. Merangin	52.910	23.120	35.462	14.401
10	Kab. Kerinci	62.249	20.381	31.896	11.229
11	Kota Sungai Penuh	12.278	6.430	14.916	9.248
12	**Provinsi Jambi**	**676.832**	**309.089**	**401.792**	**153.379**

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 15. Perkembangan Jumlah Anak Umur 3-6 Tahun Terlayani PAUD Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PAUD				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	10.385	11.284	27.401	30.176	30.78
2	Kab. Muaro Jambi	8.474	8.847	18.817	21.135	23.453
3	Kab. Batang Hari	6.368	6.792	13.113	16.06	19.007
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.141	7.862	13.072	13.211	15.893
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.495	9.075	10.905	12.339	13.773
6	Kab. Tebo	8.758	10.258	14.222	16.07	17.918
7	Kab. Bungo	5.621	6.656	14.169	15.543	16.917
8	Kab. Sarolangun	12.549	13.836	16.217	17.563	18.909
9	Kab. Merangin	12.254	12.254	19.962	21.823	23.684
10	Kab. Kerinci	7.195	7.274	11.07	11.992	12.003
11	Kota Sungai Penuh	4.543	4.651	4.685	4.789	4.893
Provinsi Jambi		**85.42**	**98.79**	**163.63**	**180.70**	**197.23**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 16. Jumlah Pengangguran Terbuka per kabupaten/kota Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015
1	Kota Jambi	23.912
2	Kab. Muaro Jambi	9.51
3	Kab. Batang Hari	4.003
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.536
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.96
6	Kab. Tebo	3.28
7	Kab. Bungo	4.617
8	Kab. Sarolangun	6.202
9	Kab. Merangin	3.29
10	Kab. Kerinci	4.615
11	Kota Sungai Penuh	3.508
12	**Provinsi Jambi**	**68.433**

Sumber : BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 17. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	224	253	267	267	267
2	Kab. Muaro Jambi	16	4	16	16	16
3	Kab. Batang Hari	22	22	22	22	22
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	27	27	27	27	27
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	33	33	33	33	33
6	Kab. Tebo	41	60	60	60	65
7	Kab. Bungo	78	41	27	30	45
8	Kab. Sarolangun	33	33	34	15	16
9	Kab. Merangin	80	80	80	25	25
10	Kab. Kerinci	163	170	182	197	197
11	Kota Sungai Penuh	44	37	33	27	22
12	**Provinsi Jambi**	**761**	**760**	**781**	**719**	**735**

Sumber : BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 18. Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	775	2900	3300	3466	7327
2	Kab. Muaro Jambi	466	458	494	508	186
3	Kab. Batang Hari	94	192	181	299	254
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	169	194	474	797	685
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	127	61	105	160	193
6	Kab. Tebo	180	220	240	240	300
7	Kab. Bungo	99	99	580	620	765
8	Kab. Sarolangun	160	200	204	180	145
9	Kab. Merangin	424	487	554	476	732
10	Kab. Kerinci	424	382	1226	977	1526
11	Kota Sungai Penuh	1322	958	998	1012	1182
12	**Provinsi Jambi**	**4240**	**6151**	**8356**	**8735**	**13295**

Lampiran 19. Jumlah Lembaga PKBM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Jambi	20	25	19	23	32
2	Kab. Muaro Jambi	12	12	21	26	27
3	Kab. Batang Hari	13	13	7	13	11
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	9	9	15	16	17
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	15	15	26	28	29
6	Kab. Tebo	15	25	14	14	28
7	Kab. Bungo	10	10	20	20	20
8	Kab. Sarolangun	14	14	22	23	30
9	Kab. Merangin	41	41	41	29	25
10	Kab. Kerinci	73	80	82	97	97
11	Kota Sungai Penuh	15	15	36	36	36
12	**Provinsi Jambi**	**237**	**259**	**303**	**325**	**352**

Lampiran 20. Jumlah dan Persentase Pengangguran Yang Terlayani PKH Tahun 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015	
		JML	% Tase
1	Kota Jambi	23.912	8,74%
2	Kab. Muaro Jambi		
3	Kab. Batang Hari	4.003	3,38%
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.486	2,69%
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.96	5,86%
6	Kab. Tebo	60	33,33%
7	Kab. Bungo	1.154	24,80%
8	Kab. Sarolangun	397	6,4%
9	Kab. Merangin	469	11,11%
10	Kab. Kerinci	450	75,00%
11	Kota Sungai Penuh		
12	**Provinsi Jambi**	**35.891**	**20,32%**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 21. Jumlah Penduduk Tuna Aksara Umur 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin per kabupaten/kota Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kota Jambi	492	939	1.431
2	Kab. Muaro Jambi	875	2270	3.145
3	Kab. Batang Hari	1.026	4.610	5.636
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.828	4.778	7.606
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.069	1.876	2.945
6	Kab. Tebo	812	2970	3.782
7	Kab. Bungo	2.064	4.397	6.461
8	Kab. Sarolangun	1.566	4.496	6.034
9	Kab. Merangin	698	882	1.580
10	Kab. Kerinci	992	3.345	4.337
11	Kota Sungai Penuh	176	942	1.118
12	**Provinsi Jambi**	**12.598**	**31.505**	**44.075**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 22. Disparitas Angka Melek Huruf Laki-Laki Terhadap Perempuan Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2015		
		LK	PR	JML
1	Kota Jambi	178.233	174.112	352.346
2	Kab. Muaro Jambi	143.559	131.339	277.898
3	Kab. Batang Hari	93.158	84.191	177.349
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	77.620	70.561	148.181
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	113.756	101.167	214.923
6	Kab. Tebo	118.714	107.474	226.188
7	Kab. Bungo	118.075	114.155	232.230
8	Kab. Sarolangun	88.937	81.960	170.925
9	Kab. Merangin	97.029	95.025	192.054
10	Kab. Kerinci	83.770	85.919	169.689
11	Kota Sungai Penuh	30.811	31.796	62.607
12	**Provinsi Jambi**	**1.143.662**	**1.077.699**	**2.224.390**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 23. Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PAUD								
		2013			2014			2015		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kota Jambi	13.763	13.639	27.401	14.892	15.284	30.176	15.190	15.590	30.780
2	Kab. Muaro Jambi	9.077	9.741	18.817	10.419	10.716	21.135	11.561	11.891	23.453
3	Kab. Batang Hari	5.278	7.835	13.113	7.925	8.135	16.060	9.379	9.628	19.007
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.557	6.515	13.072	6.595	6.616	13.211	7.934	7.959	15.893
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.942	6.963	10.905	4.393	7.946	12.339	4.904	8.869	13.773
6	Kab. Tebo	6.927	7.295	14.222	7.406	8.664	16.070	8.258	9.660	17.918
7	Kab. Bungo	6.527	7.642	14.169	7.236	8.307	15.543	7.876	9.041	16.917
8	Kab. Sarolangun	8.531	7.687	16.217	8.637	8.926	17.563	9.299	9.610	18.909
9	Kab. Merangin	10.113	9.849	19.962	10.905	10.918	21.823	11.835	11.849	23.684
10	Kab. Kerinci	6.159	4.911	11.070	6.048	5.944	11.992	6.054	5.949	12.003
11	Kota Sungai Penuh	2.039	2.646	4.685	2.116	2.673	4.789	2.162	2.731	4.893
Provinsi Jambi		**78.912**	**84.722**	**163.634**	**86.572**	**94.129**	**180.701**	**94.452**	**102.777**	**197.230**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 24. Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Kota Jambi	36.915	34.628	71.543	40.312	37.813	78.125	41.119	38.569	79.688
2	Kab. Muaro Jambi	23.295	22.135	45.430	23.465	22.296	45.761	23.635	22.457	46.092
3	Kab. Batang Hari	16.859	16.076	32.935	18.295	17.444	35.739	19.731	18.812	38.543
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	13.283	12.876	26.159	13.481	13.068	26.549	13.679	13.260	26.939
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	13.788	13.430	27.218	20.312	19.783	40.095	26.836	26.136	52.972
6	Kab. Tebo	22.121	20.792	42.913	22.476	21.126	43.602	22.832	21.459	44.291
7	Kab. Bungo	23.365	22.085	45.450	24.361	23.025	47.386	25.357	23.965	49.322
8	Kab. Sarolangun	19.113	18.200	37.313	19.216	18.298	37.514	19.320	18.395	37.715
9	Kab. Merangin	24.526	23.195	47.721	25.315	23.942	49.257	25.678	24.284	49.962
10	Kab. Kerinci	13.218	12.125	25.343	13.397	12.289	25.686	14.201	13.026	27.227
11	Kota Sungai Penuh	5.273	4.868	10.141	5.453	5.033	10.486	5.461	5.039	10.500
12	**Provinsi Jambi**	**211.756**	**200.410**	**412.166**	**226.083**	**214.117**	**440.200**	**237.849**	**225.403**	**463.251**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 25. Perkembangan APM SD/MI/Paket A Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	99,70	98,71	99,20	99,32	99,72	99,52	99,52	99,92	99,72
2	Kab. Muaro Jambi	98,54	99,53	99,04	99,00	99,95	99,48	99,20	99,98	99,59
3	Kab. Batang Hari	98,16	99,89	99,02	99,25	99,23	99,24	99,45	99,43	99,44
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	98,64	99,75	99,19	99,23	99,32	99,27	99,43	99,52	99,48
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	99,66	99,85	99,75	99,83	99,97	99,90	99,93	99,98	99,96
6	Kab. Tebo	99,49	97,66	98,57	99,71	99,21	99,46	99,91	99,41	99,66
7	Kab. Bungo	99,32	99,70	99,51	99,74	99,61	99,67	99,94	99,81	99,88
8	Kab. Sarolangun	99,41	98,81	99,11	99,52	99,74	99,63	99,72	99,94	99,83
9	Kab. Merangin	99,86	98,84	99,35	99,26	99,88	99,57	99,46	99,98	99,72
10	Kab. Kerinci	99,44	99,50	99,47	99,84	99,50	99,67	99,94	99,70	99,82
11	Kota Sungai Penuh	99,03	99,22	99,13	99,19	99,20	99,19	99,39	99,40	99,40
12	**Provinsi Jambi**	**99,20**	**99,22**	**99,21**	**99,44**	**99,57**	**99,51**	**99,63**	**99,73**	**99,68**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 26. Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Menurut PG dan IPG Tahun 2013 - 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	APM Laki-Laki	99,20	99,44	99,63
2	APM Perempuan	99,22	99,51	99,73
3	Jumlah Rata-Rata	99,21	99,48	99,68
4	% Laki – Laki	49,35	49,37	51,36
5	% Perempuan	50,65	50,63	48,64
6	Paritas Gender (PG)	1,30%	1,27%	2,72%

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 27. Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B
Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	16.475	17.260	33.735	17.340	18.165	35.505	17.687	18.528	36.215
2	Kab. Muaro Jambi	8.873	8.906	17.779	9.258	9.291	18.549	9.643	9.676	19.319
3	Kab. Batang Hari	6.215	6.411	12.626	6.727	6.938	13.665	7.030	7.022	14.052
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	4.866	5.538	10.404	5.069	5.767	10.836	5.272	6.812	12.084
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.208	7.217	14.425	7.840	7.848	15.688	9.068	8.516	17.584
6	Kab. Tebo	8.826	8.494	17.320	9.218	8.871	18.089	9.610	9.129	18.739
7	Kab. Bungo	8.265	8.815	17.080	8.471	9.034	17.505	10.012	10.540	20.552
8	Kab. Sarolangun	7.312	7.098	14.410	7.913	7.680	15.593	8.514	8.262	16.776
9	Kab. Merangin	9.277	9.586	18.863	10.096	10.432	20.528	10.239	10.621	20.860
10	Kab. Kerinci	5.706	5.971	11.677	6.054	6.334	12.388	6.208	6.697	12.905
11	Kota Sungai Penuh	2.354	2.503	4.857	2.798	2.973	5.771	2.832	3.443	6.275
12	**Provinsi Jambi**	**85.377**	**87.799**	**173.176**	**90.784**	**93.333**	**184.117**	**96.115**	**99.246**	**195.361**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 28. Perkembangan APK SMP/MTS/Paket B Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2013			2014			2015		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	Kota Jambi	112,50	115,14	113,82	113,68	120,45	117,06	118,47	122,09	120,28
2	Kab. Muaro Jambi	100,41	99,56	99,99	97,52	104,73	101,13	88,32	85,62	86,97
3	Kab. Batang Hari	97,67	104,13	100,90	100,12	107,70	103,91	98,12	99,01	98,56
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	91,21	106,68	98,95	91,12	109,31	100,21	92,62	122,36	107,49
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	94,43	103,40	98,91	97,66	105,12	101,39	104,22	102,90	103,56
6	Kab. Tebo	98,90	98,91	98,90	100,42	102,88	101,65	103,57	101,00	102,28
7	Kab. Bungo	93,00	109,11	101,06	96,59	107,89	102,24	102,02	107,98	105,00
8	Kab. Sarolangun	107,29	102,06	104,67	105,42	106,33	105,87	102,86	102,33	102,60
9	Kab. Merangin	95,60	103,20	99,40	96,12	104,31	100,21	97,61	103,24	100,42
10	Kab. Kerinci	98,28	102,21	100,24	101,20	105,57	103,39	98,48	111,82	105,15
11	Kota Sungai Penuh	92,86	106,28	99,57	97,83	102,34	100,09	119,04	147,77	133,40
12	**Provinsi Jambi**	**98,38**	**104,61**	**101,49**	**99,79**	**106,97**	**103,38**	**102,30**	**109,65**	**105,97**

Sumber : Disdik, Kemenag, dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 29. Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B Menurut PG dan IPG Tahun 2013 – 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	APK Laki-Laki	98,38	99,79	102,30
2	APK Perempuan	104,61	106,97	109,65
3	Jumlah Rata-Rata	101,49	103,38	105,97
4	% Laki - Laki	49,30	49,31	49,20
5	% Perempuan	50,70	50,69	50,80
6	Paritas Gender (PG)	-1,40	-1,38	-1,60

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 30. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN 2014
1	GURU TK	11.500
	LAKI - LAKI	522
	PEREMPUAN	10.978
	% LAKI - LAKI	4,54%
	% PEREMPUAN	95,46%
	PARITAS GENDER	90,92%
	INDEKS PARITAS GENDER	21,03
2	GURU SD	28.197
	LAKI - LAKI	6.533
	PEREMPUAN	21.664
	% LAKI - LAKI	23,17%
	% PEREMPUAN	76,83%
	PARITAS GENDER	53,66%
	INDEKS PARITAS GENDER	3,32
3	GURU SMP	11.593
	LAKI - LAKI	4.687
	PEREMPUAN	6.906
	% LAKI - LAKI	40,43%
	% PEREMPUAN	59,57%
	PARITAS GENDER	19,14%
	INDEKS PARITAS GENDER	1,47
4	GURU SMA	2.138
	LAKI - LAKI	612
	PEREMPUAN	1.526
	% LAKI - LAKI	28,62%
	% PEREMPUAN	71,38%
	PARITAS GENDER	42,75%
	INDEKS PARITAS GENDER	2,49
5	GURU SMK	1.587
	LAKI - LAKI	561
	PEREMPUAN	1.026
	% LAKI - LAKI	35,35%
	% PEREMPUAN	64,65%
	PARITAS GENDER	29,30%
	INDEKS PARITAS GENDER	1,83

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 31. Perkembangan Rasio Siswa Guru Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	TK	1 : 16	1 : 16	1 : 16
2	SD	1 : 16	1 : 17	1 : 14
3	SMP	1 : 17	1 : 18	1 : 11
4	SMA	1 : 8	1 : 10	1 : 12
5	SMK	1 : 8	1 : 10	1 : 10

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 32. Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	TK	13,77%	16,11%	18,46%
2	SD	31,31%	33,86%	36,43%
3	SMP	55,03%	57,77%	60,54%
4	SMA	69,23%	72,68%	76,17%
5	SMK	52,17%	53,66%	55,18%
6	**RATA-RATA**	**44,30%**	**46,82%**	**49,36%**

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 33. Perkembangan Persentase Guru SD, SMP dan SM Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 – 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	**GURU SD**			
	- DI/DII	26,67%	21,88%	
	- DIII	6,62%	4,55%	
	- S1	55,30%	68,47%	
	- S2	0,52%	0,54%	
	- S3	0,00%	0,00%	
2	**GURU SMP**			
	- DI/DII	9,78%	8,90%	
	- DIII	8,51%	7,16%	
	- S1	75,83%	76,59%	
	- S2	1,41%	1,80%	
	- S3	0,00%	0,00%	
3	**GURU SM**			
	- DI/DII	1,58%	0,44%	
	- DIII	2,12%	1,87%	
	- S1	85,74%	88,46%	
	- S2	2,39%	3,53%	
	- S3	0,02%	0,02%	

Sumber : diolah dari data Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Lampiran 34. Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP per kabupaten/kota Tahun 2013 - 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Kota Jambi	28,94	31,04	71,80
2	Kab. Muaro Jambi	28,72	30,39	59,30
3	Kab. Batang Hari	27,23	28,94	53,10
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	28,86	30,88	51,80
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	25,57	28,61	56,40
6	Kab. Tebo	25,07	27,90	53,30
7	Kab. Bungo	27,50	29,91	46,50
8	Kab. Sarolangun	26,48	27,86	44,10
9	Kab. Merangin	26,15	26,17	49,60
10	Kab. Kerinci	32,18	32,95	41,60
11	Kota Sungai Penuh	29,37	30,72	45,50
12	**Provinsi Jambi**	**27,82**	**29,58**	**52,09**

Sumber : Tim Pengelola UN Disdik Provinsi Jambi

Lampiran 35. Perkembangan Persentase Lulusan SD, SMP dan SM Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	SD	99,64%	99,87%	98,76%
2	SMP	99,32%	99,41%	97,25%
3	SMA	98,32%	99,32%	98,21%
4	SMK	99,27%	99,41%	83,86%
5	**Provinsi Jambi**	**99,14%**	**99,50%**	**94,52%**

Sumber : Tim Pengelola UN Disdik se-Provinsi Jambi

Lampiran 36. Perkembangan Jumlah SD, SMP, dan SM yang Terakreditasi Tahun 2013 – 2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	SD	2.023	2.190	1.195
2	SMP	445	457	381
3	SMA	181	206	158
4	SMK	108	117	155
5	**Provinsi Jambi**	**2.757**	**2.970**	**1.889**

Sumber : Disdik dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi